

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
DALAM PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DI KOTA DUMAI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Bidang Ilmu- Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Islam Riau

Muhammad Badria
NPM: 157310546

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

PERAN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA DALAM PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN KOTA DUMAI

ABSTRAK

Muhammad Badria

Pemuda merupakan mereka yang mempunyai karakteristik Energik, Dinamis, Kreatif dan Inovatif. Ada beberapa potensi luar biasa yang dimiliki oleh pemuda, antara lain Berani, Kuat secara fisik, komunikasi dan jaringan luas, pemikiran yang belum terkontaminasi, kreatifitas yang tinggi, semangat dan pantang menyerah dan punya jiwa kepeloporan. Membuat kebijakan publik mengenai kepemudaan merupakan salah satu langkah awal pemerintah dalam pengupayaan menyelesaikan permasalahan pada Pembinaan Kepemudaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan terhadap Organisasi Kepemudaan untuk mendorong berbagai kegiatan pemuda. Akan tetapi, Pembinaan tersebut belum dilakukan secara maksimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan Kota Dumai dan untuk mengetahui factor penghambat dalam Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. Adapun tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan Kota Dumai belum berjalan secara efektif. Factor penghambat Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai adalah Minimnya Anggaran Dana, Kurangnya Program Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Kurangnya Koordinasi antar Dinas dengan Organisasi Kepemudaan dan antar Dinas dengan Dinas lainnya.

Kata Kunci : Peran, Pembinaan, Organisasi Kepemudaan

ROLE OF YOUTH, SPORTS AND TOURISM DEPARTMENTS IN DEVELOPMENT OF YOUTH ORGANIZATIONS IN DUMAI CITY

ABSTRACT

Muhammad Badria

Youth are those who have Energetic, Dynamic, Creative and Innovative characteristics. There are some extraordinary potential possessed by young people, including Brave, Physically strong, education and wide networks, uncontaminated thinking, high creativity, enthusiasm and unyielding spirit and pioneering spirit. Making public policy on youth is one of the first steps the government has made in trying to solve problems in Youth Development. Therefore, it is necessary to foster youth organizations to encourage various youth activities. However, coaching has not been done optimally. The purpose of this study was to determine the Role of the Department of Youth, Sports and Tourism in the Development of the Youth Organization of the City of Dumai and to determine the inhibiting factors in the Role of the Department of Youth, Sports and Tourism of the City of Dumai. The type of research that the author uses in this study uses a qualitative method. The results showed that the role of the Department of Youth, Sports and Tourism in the Development of Youth Organization in Dumai City has not been effective. Inhibiting the Role of the Department of Youth, Sports and Tourism in the City of Dumai is the Lack of Budget Funds, Lack of Youth Organization Development Programs and Lack of Coordination between Offices with Youth Organizations and between Offices and other Departments.

Key Word : Role, Coaching, Youth Organization

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, tuhan semesta alam yang telah mencurahkan berjuta kenikmatan dan anugrah yang tidak terhingga yang dengan nikmat-Nya itulah penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kota Dumai”**.

Shalawat beserta salam kita hadiahkan untuk junjungan alam Nabi Muhammad S.A.W. yang telah membawa kita kealam yang damai dan terang benderang ini.

Tidak lupa ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak- pihak yang turut andil dan memberikan sumbangsih dalam proses penyusunan usulan penelitian yakni:

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., MCL, selaku rector Universitas Islam Riau yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Rizky Setiawan, S.IP., M.Si selaku Pembimbing yang dengan sabar dan telah banyak membantu mengarahkan dalam penulisan usulan penelitian ini.

5. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staff Tata Usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
6. Buat Bunda dan Ayahanda dan Keluarga yang tak henti- hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepada penulis yang tidak bias disebutkan satu persatu.
7. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata beserta pegawai yang telah bersedia memberikan data awal dan pengumpulan data penelitian yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Sahabat Aliansi Para Pemimpi Hamrizal dan Ade Kurniono yang senantiasa menemani saya dalam suka dan Duka.
9. Kepada Teman- teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian maupun dalam perkuliahan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan ini akan menjadi amal kebaikan. Terima Kasih.

Pekanbaru, 18 Desember 2019
Ttd,
Penulis,

Muhammad Badria

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA KONFRENHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PERNYATAN KEASLIAN NASKAH.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	14

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan.....	15
1. Konsep Pemerintahan.....	15
2. Konsep Pemerintahan Daerah	19
3. Konsep Kepemimpinan Daerah	21
4. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	23
5. Konsep Peran	24
6. Konsep Organisasi	28
7. Konsep Pemuda	30
8. Konsep Pembinaan	33
B. Penelitian Terdahulu	36
C. Kerangka Pikir	39
D. Konsep Operasional	40
E. Operasional Variabel.....	41

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Informan.....	45
D. Jenis Dan Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisa Data.....	47
G. Jadwal Dan Waktu Penelitian	48

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Dumai	49
B. Gambaran Umum Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai	55
C. Struktur Organisasi	59
D. Sumber Daya Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai	61
E. Gambaran Umum Organisasi Kepemudaan	63

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Informan	72
B. Hasil Penelitian dan Observasi Peneliti di Lapangan	74
C. Hambatan- Hambatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	94

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	96
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA	100
-----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Daftar nama Organisasi Kepemudaan Kota Dumai 2019.....	8
Tabel I.2 Program Kepemudaan Kota Dumai 2019.....	10
Tabel I.3 Anggaran Dana bagian Kepemudaan Kota Dumai 2019.....	10
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel II.2 Operasional Variabel Tentang Peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kota Dumai	41
Tabel III.1 Jadwal Kegiatan Penelitian Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kota Dumai Tahun 2019	48
Tabel IV.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	61
Tabel IV. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jumlah Pejabat Eselon	61
Tabel IV. 3 Daftar Organisasi Kepemudaan yang menjadi subjek Penelitian.	63
Tabel IV. 4 Daftar Organisasi Kepemudaan dibawah Koordinasi KNPI	63
Tabel V.1 Jenis Kelamin Informan	72
Tabel V.2 Pendidikan Informan	73
Tabel V.3 Usia Informan	74

DAFTAR GAMBAR

II.1 Gambar Kerangka Pikir Tentang Peranan Camat Dalam Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintah Desa DiKecamatan Belat Kabupaten Karimun	43
IV.1 Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai	60



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar wawancara (untuk informan Kabid Kepemudaan, Kasi Pemberdayaan Pemuda, Kasi Organisasi Pemuda, Kasi Sarana dan Prasarana dan Organisasi Kepemudaan) Penelitian tentang Peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kota Dumai 103
2. Foto dokumentasi penelitian tentang Fungsi Pelayanan Pemerintah Kecamatan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tanah Dikantor Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar 107



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan publik mengenai kepemudaan merupakan salah satu langkah awal pemerintah dalam pengupayaan menyelesaikan permasalahan pada Pembinaan Kepemudaan. Apabila sebelumnya terdapat Undang-undang khusus yang mengatur eksistensi pemuda, pada tahun 2009 pemerintah khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah berhasil menerbitkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan yang selanjutnya disingkat Undang-undang Kepemudaan. Garis besar Undang-undang tersebut melingkupi jaminan kepastian hukum tentang apa yang harus dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pemuda agar pemuda bisa memiliki kapasitas dan daya saing. Selain itu, inti Undang-undang Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda sebagai bentuk pelayanan terhadap pemuda serta menjamin sumber pendanaan bagi program pembangunan kepemudaan dan sarana pembangunan Kepemudaan adalah pemuda sebagai individu, kelompok dan lembaga.

Dalam Undang-undang Kepemudaan disebutkan bahwa pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun (pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 40/2009 Tentang Kepemudaan). Selanjutnya Organisasi Kepemudaan dalam Undang-Undang ini didefinisikan sebagai organisasi yang dibentuk oleh pemuda-pemuda yang memiliki kesamaan asas,

agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan pemuda yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.

Terbitnya Undang-Undang Kepemudaan memberikan era baru bagi proses Pemberdayaan terhadap pemuda. Undang-Undang tersebut memberi peluang bagi pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam menuntut hak serta melakukan kewajibannya. Potensi partisipasi yang dimiliki masyarakat tidaklah timbul begitu saja, tetapi memerlukan usaha-usaha untuk menggerakkannya, sebagaimana amanat dari Undang-undang no 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan pada pasal 24 ayat 2 pemberdayaan kepemudaan harus dilakukan dan difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kepemudaan, Kepala Daerah yang dalam hal ini Dinas pemuda dan olahraga sebagai organisasi teknis dituntut kemampuan dan ketrampilan yang memadai, disertai dengan penerapan undang-undang yang dapat membangkitkan kesadaran dan bakat generasi muda dalam rangka pembangunan.

Peranan generasi muda dalam pembangunan sangat penting artinya, bukan saja karena pemuda sebagai lapisan masyarakat paling besar tetapi yang paling penting adalah tanpa potensi dan kreativitas generasi muda, maka pembangunan akan dapat kehilangan arah. Berdasarkan Undang-undang nomor 40 Tahun 2009 (pasal 7) tentang Kepemudaan mengamanatkan kepada pemerintah daerah yakni gubernur/bupati/walikota wajib melaksanakan pelayanan kepemudaan yang tujuannya diarahkan untuk pembangunan.

Pembangunan dimaksud menurut Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2009 pasal tujuh (7) yaitu :

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi dan semangat profesionalitas dan meningkatkan partisipasi.
- b. peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- c. Pembangunan Pemuda juga bertujuan untuk menjadikan pemuda berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing.

Berdasarkan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12 ayat (2) huruf (m) Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Urusan Kepemudaan termasuk dalam Urusan Pemerintahan Konkuren Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 35 ayat 4 (Empat) Tentang dinas Daerah Kabupaten/ Kota berbunyi:.

Dinas Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

Dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bahwa Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Pada bidang Kepemudaan seperti tersebut dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 63 Tahun 2016 Pasal 15 Bidang Kepemudaan terdiri dari:

- a. Seksi Organisasi Pemuda;
- b. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda.

Untuk melaksanakan Tugas dari bidang Kepemudaan yang tersebut dalam Pasal 15, Seksi- Seksi tersebut diamanatkan menjalankan tugas yang tertuang dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 16 tentang tugas Seksi Organisasi Pemuda, Pasal 17 Tentang tugas Seksi Pemberdayaan Pemuda dan Pasal 18 tentang tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda.

Pada Peraturan Walikota Dumai Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Pasal 16 yang menjelaskan tentang uraian tugas Seksi Organisasi Pemuda yaitu:

1. Seksi Organisasi Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan tentang pembinaan dan pengembangan pemuda

2. Uraian tugas seksi Organisasi Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana berikut:
 - c. Menghimpun, mengelola data kegiatan pemuda dan olahraga pemuda yang meliputi Kepramukaan, Karang Taruna, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Palang Merah Remaja (PMR), Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), Drum Band serta penyelenggaraan Pembinaan kegiatan;
 - d. Membina pengembangan kepemudaan, produktifitas dan kewirausahaan, wawasan dan potensi pemuda;
 - c. Menyiapkan dan melaksanakan perencanaan, analisis, evaluasi, bimbingan teknis bidang pengembangan kegiatan anak remaja dan kepemudaan;

Pada Pasal 17 menjelaskan tentang tugas Seksi Pemberdayaan Pemuda yaitu:

1. Seksi Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan produktifitas dan kreativitas pemuda.
2. Uraian tugas seksi Pemberadayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Menyusun desain dan kerangka acuan teknis kegitanan peningkatan pemberdayaan dan produktifitas pemuda;

- b. Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan pengembangan produktifitas pemuda pada tingkat kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
- c. Melakukan pembinaan teknis dan pendampingan dalam rangka pengembangan kreativitas dan kewirausahaan pemuda;

Pada pasal 18 tentang tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda yaitu:

Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan di Bidang Sarana dan Prasarana Pemuda.

1. Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pengadaan dan pembangunan sarana dan prasaranan Kepemudaan;

Pada masa sekarang pemuda dihadapkan dengan masalah- masalah yang baru dan salah satunya pemuda justru turut menjadi bagian dalam permasalahan bangsa. Tidak sedikit pemuda yang terjerumus dalam masalah- masalah sosial seperti Kriminalitas, Tawuran, Premanisme, Narkotika, psikotropika, zat adaktif (NAPZA) dan HIV/ AIDS. Rendahnya kepedulian pemuda terhadap berbagai permasalahan masyarakat juga telah menjadikan sebagian pemuda menjadi kalangan yang apatis, acuh dan egois. Selain itu lahirnya budaya permisif, Budaya Hedonis dan Budaya kebarat- baratan telah melunturkan semangat kepribadian nasional dan nilai- nilai luhur bangsa.

Sebuah kewajiban bersama untuk dapat menyelesaikan masalah- masalah tersebut. Namun, upaya mengatasi masalah dalam Pemberdayaan potensi pemuda tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, tetapi oleh masyarakat dan pemuda itu sendiri. Tugas pemerintah adalah untuk memiliki kemampuan dalam memberikan yang terbaik untuk pemuda baik dalam infrastruktur, support, hingga bantuan materil dalam pencapaian pembangunan pemuda yang maksimal.

Untuk dapat mewujudkan tujuan dari pembangunan, maka dibutuhkan keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini disadari bahwa perwujudan tegaknya demokrasi Pancasila bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik individu maupun kelompok - kelompok dalam masyarakat, termasuk juga dalamnya generasi muda.

Partisipasi generasi muda dalam pembangunan harus sejalan dengan cita-cita nasional, dalam lingkungan ini diharapkan generasi muda untuk mengambil bagian secara efektif memelopori usaha-usaha masyarakat pancasila dikalangan generasi muda itu sendiri. Pada prinsipnya peranan generasi muda merupakan rangkaian usaha meningkatkan dan menetapkan kesadaran kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan diatas maka penulis berkeinginan untuk membahas secara ilmiah mengenai kehadiran generasi muda sekarang ini.

Pemuda yang memilki asas kesamaan tujuan membentuk sebuah wadah perkumpulan yang disebut dengan Organisasi. Organisasi adalah wadah tempat berhimpun orang- orang yang mempunyai asas kesamaan tujuan, agama, ras, suku

atau yang berhubungan dengan karakter. Organisasi yang didalamnya tergabung para pemuda yang membentuk perkumpulan berdasarkan visi dan misi dengan ketentuan peraturan yang berlaku disebut dengan Organisasi Kepemudaan.

Kota Dumai mempunyai banyak sekali wadah berkumpul para pemuda, mulai dari perkumpulan biasa, Komunitas hingga Organisasi Kepemudaan itu sendiri. Organisasi Kepemudaan yang berada di Kota Dumai cukup banyak, tetapi hanya 47 Organisasi yang tercatat dalam Data pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Tabel I.1 Daftar nama Organisasi Kepemudaan Kota Dumai

1	2
No	Nama Organisasi
1.	Bangun Sari Sekitarnya (BANSER)
2.	Front Pembela Islam (FPI)
3.	GM Forum Komunikasi Putra-putri Polri TNI Indonesia
4.	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
5.	Ikatan Pemuda Minang Riau (IPMR)
6.	IPEMAKESS (Ikatan Pemuda Mahasiswa Kec. Sungai Sembilan
7.	IPBB (Ikatan Pemuda Basilam Baru)
8.	IP3D (Ikatan Pemuda Pemuda Pematang Duku)
9.	Gabungan Pemuda Simpang tetap Darul Ikhsan (STDI)
10.	Ikatan Remaja Masjid Al- Hijriah
11.	Ikatan Remaja Masjid Al- Mukarrimah
12.	Ikatan Remaja Masjid Al- Hikmah
13.	Ikatan Remaja Cengkeh (IRC)
14.	Karang Taruna Kel. Laksamana)
15.	Karang Taruna Kel. Bintang
16.	Karang Taruna Kel. Bumi Ayu
17.	Karang Taruna Kel. Rimba Sekampung
18.	Karang Taruna Kota
19.	Karang Taruna Kel. Simpang Tetap
20.	Karang Taruna Kel. Bukit Datuk
21.	Karang Taruna Kel. Bukit Timah
22.	Karang Taruna Kel. Mekar Sari

1	2
23.	Karang Taruna Kel. Ratu Sima
24.	KNPI Kota
25.	KNPI Tingkat Kec. Sungai Sembilan
26.	Marching Band Gitawibawa Praja
27.	Pemuda Pancasila
28.	Pemuda Pancasila Kec. Sungai Sembilan
29.	Pemuda Pancasila Simpang Tetap
30.	Pemuda Pancasila Ranting
31.	Pemuda Pancasila Dumai Kota
32.	Pemuda RT. 01 Simpang Tetap
33.	Pemuda RT. 08 Simpang Tetap
34.	Pemuda Meranti
35.	Ikatan Pemuda Meranti RT 11
36.	Persatuan Pemuda Pemudi Bunga Tanjung
37.	PMI
38.	Pramuka Kota Dumai
39.	Purna Pakibraka Indonesia (PPI)
40.	Remaja Gunung Louser (REGULER)
41.	Remaja Mesjid At- Taubah
42.	Remaja Mesjid Baitul Rahim
43.	Remaja Mesjid Al- Muflihah
44.	Remaja Musholla Nurul Huda
45.	Remaja Solidaritas Community (RESCOM)
46.	Remaja Mesjid Al- Ikhlas
47.	PPP (Persatuan Pemuda Pemudi)

Sumber: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

Data diatas menunjukkan bahwa Organisasi Kepemudaan yang terdaftar dalam data yang ada di Kota Dumai berjumlah 47 Organisasi. Dalam hal ini masih banyak Organisasi yang belum terdaftar di bawah Koordinasi dari Dinas Kepemudaan. Ini menandakan kurangnya Sosialisasi dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata selaku Instansi yang menaungi masalah Kepemudaan.

Didalam tabel diatas juga terdapat Organisasi yang tidak berada dibawah naungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yaitu Palang Merah

Indonesia (PMI) yang seharusnya berada dibawah naungan Dinas Kesehatan, Front Pembela Islam (FPI) adalah sebuah Organisasi Kemasyarakatan dibawah Komando Ulama, Pemuda Pancasila (PP) adalah Organisasi Kemasyarakatan dan lain- lain. Masih banyak Organisasi yang tidak terlampir pada data tabel tersebut padahal mereka terus aktif dan mempunyai Badan Hukum yang sudah didata di Kesbangpol.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai mempunyai Program untuk Kepemudaan yaitu :

Tabel I.2 Program Kepemudaan Kota Dumai Tahun 2019

No.	Visi dan Misi	Program Kegiatan	Jenis Kegiatan
1	Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan pemuda untuk kemandirian	1. Peningkatan peran serta kepemudaan	a. Seleksi dan Pembinaan Pakibraka b. Pembinaan Marching Bnad

Sumber : Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

Tabel diatas menjelaskan bahwa untuk program pemuda khususnya Organisasi Kepemudaan hanya dua Organisasi tersebutlah yang dapat pembinaan yang bersifat khusus dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Padahal Jumlah Organisasi Kepemudaan yang ada di Kota Dumai banyak dan perlu Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengembangan dari Pemerintah Daerah Kota Dumai.

Tabel I.3 Anggaran Dana Bagian Kepemudaan Kota Dumai Tahun 2019

No	Jenis Kegiatan	Anggaran Kegiatan
1.	Seleksi dan Pembinaan Pakibraka	Rp. 513. 000. 000.-
2.	Pembinaan Marching Band	Rp. 131. 000. 000.-

Sumber: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

Tabel anggaran diatas terlihat begitu besar hanya untuk dua Organisasi saja yang diberikan Pembinaan. Sedangkan organisasi- organisasi Kepemudaan di Kota Dumai masih banyak dan perlu untuk diberikan Pembinaan.

Generasi muda Kota Dumai menurut pengamatan penulis banyak generasi muda yang tidak diberdayakan padahal banyak potensi bakat yang bisa dikembangkan, justru terjebak dengan situasi yang tidak menguntungkan ataupun pada situasi yang terjebak dengan keadaan yang sangat memprihatinkan karena masih banyaknya pemuda yang bergaul dengan minuman keras sehingga mengakibatkan tindakan criminal, perkelahian terjadi baik antar sesama pemuda, antar masyarakat yang tentunya dapat mengakibatkan kerugian baik materi dan kehidupan situasional yang tidak aman dan nyaman, tentunya hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pada pemerintah daerah Kota Dumai untuk membina generasi muda di Kota Dumai karena selama ini Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata patut dipertanyakan karena kurang bahkan tidak ada program- program dari pihak pemerintah Kota Dumai untuk membina generasi muda dalam hal ini Organisasi Kepemudaan di Kota Dumai yang sangat rentan dengan aksi- aksi kriminalitas, untuk melihat permasalahan yang ada yang terjadi pada generasi muda yang ada di Kota Dumai karena undang- undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengamanatkan setiap kabupaten dan Kota untuk dapat memperhatikan masalah kepemudaan yang memberikan kegiatan- kegiatan Pembinaan generasi muda agar supaya lebih kreatif dan mandiri dalam mengelola potensi- potensi yang ada dan memperkecil hal- hal yang bisa merusak tatanan kehidupan masyarakat yang ada, hal ini berdampak

pada keterlibatan mereka dalam kegiatan- kegiatan di Daerah termasuk dalam pembangunan di Kota Dumai.

Adanya Kelompok- kelompok Pemuda yang membentuk sebuah Organisasi tentu ini menjadi hal yang sangat positif, karena para Pemuda mempunyai wadah untuk mengabdikan kepada Negara dan Daerah. Organisasi yang dibentuk oleh para pemuda sejatinya ingin ikut serta dalam Pembangunan Daerah Kota Dumai. Setiap Organisasi mempunyai keahlian masing- masing. Jika setiap Organisasi diberikan Pembinaan untuk bergerak membangun daerah yang layak bagi semua individu. Peran pemerintah Daerah harus Membina Organisasi Kepemudaan Kota Dumai untuk ikut membantu Pemerintah Daerah menyelesaikan masalah- masalah yang dihadapi pemuda.

Melihat hal tersebut sangat menarik bagi penulis untuk melihat peran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai sebagai pengembang amanat rakyat dalam memberikan pelayanan kepada kepemudaan sesuai dengan undang- undang tersebut sebagaimana diamanatkan kepada pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait. Maka penulis tertarik untuk melihat dan mengkaji tentang Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Dalam Pembinaan, Pemberdayaan potensi ataupun mencari bentuk solusi untuk memberdayakan generasi muda dalam kegiatan- kegiatan yang positif tanpa terjebak pada kehidupan yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga maupun masyarakat pada umumnya di Kota Dumai.

Dari penjelasan diatas penulis mengambil beberapa fenomena- fenomena yang terjadi, adapun fenomena- fenomena tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya peran yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kota Dumai.
2. Minimnya anggaran Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.
3. Kurangnya Koordinasi yang dilakukan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dengan Organisasi Kepemudaan.

Berdasarkan Fenomena- fenomena tersebut diatas, maka penulis tertarik dalam penelitian terdahulu lebih lanjut dalam membentuk penulisan karya ilmiah dengan judul **“Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kota Dumai”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis uraian diatas, maka yang menjadi masalah pokok yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah : “Bagaimanakah Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kota Dumai?”

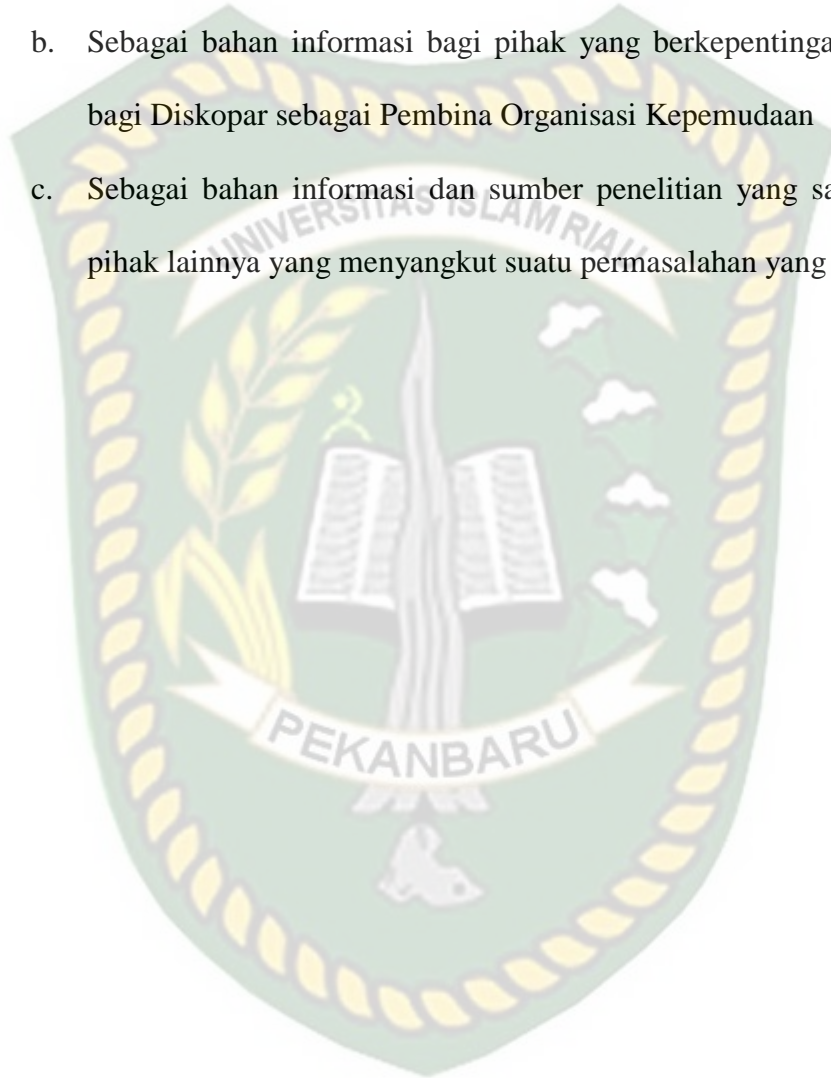
C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Pembinaan Organisasi- organisasi

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah pengetahuan tentang Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kota Dumai
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan terutama bagi Diskopar sebagai Pembina Organisasi Kepemudaan
- c. Sebagai bahan informasi dan sumber penelitian yang sama bagian pihak lainnya yang menyangkut suatu permasalahan yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

a. Pengertian Pemerintahan

Sebelum melihat definisi pemerintahan yang dipandang sebagai ilmu. Sebagaimana diungkapkan Suryaningrat (dalam syafiie, 2003;34) bahwa disiplin ilmu yang tertua adalah ilmu pemerintahan karena sudah dipelajari sejak sebelum masehi oleh para filosof yaitu Plato dan Aristoteles.

Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berbuat sera dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat- syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, universal, sistematis dan spesifik. Jadi, dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan kepengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan secara benar (Syafiie, 2005:20).

Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin dibidang legislasi, eksekutif dan yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antara pemerintah dengan yang diperintah.

Pada dasarnya pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan lembaga, pemerintah dengan pihak swasta, pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.

Secara etimologi pemerintah berasal dari kata “perintah” yang ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga pemerintahan berarti perbuatan, proses, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah. Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, sedangkan dikatakan sebagai disiplin ilmu adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materil maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (Syafiie, 2005:11).

Menurut Budiarto (2003:21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut.

Menurut Ndraha (2011:36) pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah adalah proses perbuahan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Dengan demikian pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama pemerintahan ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangannya. Kegiatan pemerintahan berkaitan dengan segala aktifitas yang terorganisasi, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara. Struktur fungsional meyangkut pemerintahan sebagai seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan negara yang dilakukan oleh pemerintah.

Dari beberapa tokoh yang dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan pemerintah merupakan suatu organisasi, dimana didalamnya terdapat orang-orang yang menjalankan tugas ataupun menjalankan kebijakan- kebijakan untuk kepentingan masyarakat ataupun negara. Untuk menjalankan roda pemerintahan khususnya dalam menjalankan kebijakan- kebijakan pemerintah harus mampu mengayomi masyarakat serta bersifat adil dan bijaksana, sehingga sesuai dengan fungsinya sebagai pemerintah.

b. Fungsi Pemerintahan

Menurut Rasyid (2005:59), menyatakan bahwa tugas- tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu : Pelayanan (*service*), Pemberdayaan (*empowerment*) dan Pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Sementara menurut Ndraha (2011:85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu :

Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.

Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggaraan pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berarti itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi didalam masyarakat akan semakin menambah

pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Dari penjelasan diatas, jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi menjadi 3 fungsi yaitu fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pelayanan. Namun didalam menjalankan ketiga fungsi diatas, pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut kebijakan pemerintah.

2. Konsep Pemerintah Daerah

Sebelum memasuki pembahasan tentang konsep pemerintahan daerah, terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan istilah pemerintahan itu sendiri. Syaukani (2002:33) mengatakan bahwa pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik didalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain. Ditingkat lokal tentu saja membina hubungan dengan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah yang lainnya.

Definisi tersebut tampak masih sangat umum, sehingga sulit untuk menentukan maksud dengan pemerintahan tersebut termuat dalam dua bentuk, yaitu pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas menyangkut kekuasaan bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Demikian juga donor mengemukakan bahwa cakupan pemerintahan dalam arti luas meliputi badan- badan yang menentukan haluan negara dan berkedudukan dipusat, kemudian terdapat juga instansi- instansi yang

melaksanakan keputusan dari badan- badan tersebut. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah pemerintahan dalam arti lembaga eksekutif saja, yang berfungsi *to execute* atau melaksanakan apa yang sudah disepakati atau diputuskan oleh pihak legislatif dan yudikatif. Mahfud (2000:18) mendefinisikan pemerintahan dalam arti sempit sebagai organ/ alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang- undang, dalam hal ini pemerintah hanya berfungsi sebagai badan eksekutif.

Pelaksanaan pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah organisasi, jika dilihat dari sudut ketatanegaraan. Sebagai sebuah organisasi, pelaksanaan pemerintahan daerah diharapkan dapat memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi. Pendelegasian sebagian wewenang dari seseorang atau instansi atau suatu organisasi merupakan salah satu azas yang berlaku universal bagi setiap organisasi, yaitu dengan tujuan agar kebijakan dapat terlaksana dengan efektif, meringankan beban kerja pimpinan, memencarkan peranan pimpinan sehingga terjadi demokratisasi dalam kegiatan organisasi. (Mustamin 1999:24-26)

Adanya pemerintahan daerah dimulai dari kebijakan desentralisasi. Desentralisasi tidak berarti putus sama sekali dengan pusat tapi hanya menjauh dari pusat. Negara Indonesia merupakan suatu organisasi yang besar dan kompleks. Oleh karenanya tidak efektif dan efisien apabila semua kewenangan baik politik maupun administrasi diletakkan pada puncak hirarki organisasi atau hanya pada pemerintah pusat, karena pemerintah pusat akan menanggung beban

berat dan penyelenggaraan pemerintahan tidak akan efisien. Agar kewenangan tersebut dapat diimplementasikan secara efisien dan akuntabel maka sebagian kewenangan politik dan administrasi perlu diserahkan pada jenjang organisasi yang lebih rendah. Penyerahan sebagian kewenangan politik dan administrasi kepada organisasi yang lebih rendah inilah yang disebut dengan desentralisasi. Jadi Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan politik dan administrasi dari puncak hirarki organisasi (pemerintah pusat) kepada jenjang organisasi dibawahnya (pemerintah daerah). Karena jenjang hirarki yang lebih rendah (pemerintah daerah) tersebut disertai wewenang penuh, baik politik maupun organisasi maka pada jenjang organisasi yang disertai wewenang tersebut timbul otonomi.

3. Kepemimpinan Pemerintahan

Kepemimpinan berasal dari kata dasar “pimpin” yang berarti bimbing atau tuntun. Dari kata pimpinan inilah lahir kata kerja “memimpin” yang artinya membimbing atau menuntun dan kata benda “pemimpin” yaitu orang-orang yang berfungsi membimbing dan menuntun.

Menurut Hasibuan (2005:43) Pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah suatu proses pengaruh sosial dimana pemimpin mengusahakan partisipasi sukarela dari para bawahan dalam suatu usaha untuk mencapai organisasi.

Menurut Gibson (1998:5) mengatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu usaha menggunakan suatu hanya mempengaruhi dan tidak memaksa untuk

memotivasi individu dalam mencapai tujuan. Definisi Gibson mengisyaratkan bahwa kepemimpinan melibatkan penggunaan pengaruh dan semua hubungan dapat melibatkan kepemimpinan.

Menurut Pasolong (2008:114-115) mengatakan bahwa persyaratan kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting, yaitu : 1. Kekuasaan, yaitu otoritas dan legalitas dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu, 2. Kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga orang mampu mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin dan bersedia melakukan perbuatan- perbuatan tertentu, 3. Kemampuan, yaitu sehalo daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan/ keterampilan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa. Menurut Pasolong (2013:32) peran pemimpin birokrasi yang mutlak dilakukan adalah (1) merencanakan, yaitu suatu hal sangat *urgent* dari seluruh kegiatan. Oleh karena perencanaan merupakan sarana bagi pemimpin birokrasi untuk menentukan ke arah mana birokrasi akan dibawa, sulit dihadapkan hasil yang baik jika perencanaan dalam birokrasi kurang baik, sekalipun pelaksanaan dilakukan secara baik. (2) Pengorganisasian, yaitu suatu konsep yang memiliki makna yang cukup luas karena menyangkut dua hal yaitu: (a) struktur organisasi sebagai wadah melaksanakan kegiatan. Secara umum yang mengatur struktur birokrasi adalah pemimpin birokratis tingkat atas (eksekutif). Akan tetapi yang dibahas adalah unit birokrasi dalam kaitannya dengan sekelompok orang yang mempersatukan orang yang mempersatukan dirinya untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat mereka laksanakan sendiri, (b) penempatan pegawai dalam birokrasi. Hal ini

pemimpin birokrasi harus mengetahui lebih dulu tentang karakteristik orang yang akan ditempatkan sebaik mungkin, guna mendapatkan orang yang tepat pada situasi bawahan yang tepat. (3) mengawasi, yaitu kegiatan pemimpin yang sangat menentukan, karena dengan mengawasi akan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan yang telah direncanakan. Pada dasarnya, pemimpin birokrasi mengawasi tiga hal yaitu uang, bahan dan pegawai. Langkah yang diperlukan dalam mengawasi adalah menentukan standar, ukuran hasil atas dasar standar dan melakukan perbaikan jika diperlukan, dan (4) Mengevaluasi, yaitu pemimpin birokrasi berperan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan para pegawai, apakah pelaksanaan pekerjaan justru terjadi inefisiensi. Hasil evaluasi inilah yang dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan- perbaikan jika ditemukan ada kendala- kendala dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat.

Berdasarkan unsur-unsur yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu cara yang dilakukkn seseorang pemimpin dengan berbagai cara untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok agar bertindak sesuai keinginan si pemimpin.

4. Manajemen Pemerintahan

Manajemen memiliki peran penting dalam menggerakkan segala sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sebagai alat pencapaian tujuan, organisasi itu tidak boleh tinggal diam atau statis. Melainkan harus bergerak melalui beberapa proses yang dinamakan manajemen, dengan

kata lain bahwa manajemen itu merupakan penggerak tubuh organisasi untuk mencapai tujuan ditentukan terlebih dahulu.

Manajemen pemerintahan adalah proses kegiatan dalam rangka melaksanakan tatakelola atau pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Fungsimanajemen pemerintahan menurut Supriyanto (2009:41), dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Manajemen pemerintahan berarti membuat keputusan- keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring atau evaluasi.
2. Manajemen pemerintahan berarti menetapkan kebijakan- kebijakan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.
3. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang ditugaskan.
4. Manajemen pemerintahan berarti penetapan pedoman perencanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian bidak tatakelola pemerintahan.

Sederhananya manajemen pemerintahan merupakan suatu kegiatan tatakelola pemerintahan yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

5. Konsep Peran

Peran menurut Poerwadarminta (1995:751) adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa” berdasarkan pendapat diatas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang

diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) Pengertian peranan adalah sebagai berikut: peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Konsep tentang peran (role) menurut Komaruddin (1994:768) dalam buku “ensiklopedia manajemen” mengungkapkan sebagai berikut :

- a. Bagian dari tugas utama dilakukan oleh manajemen;
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu pranata;
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya;
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Peranan menurut Grass, Mason dan MC Eachern (1995: 100) yang dikutip dalam buku pokok- pokok pikiran dalam sosiologi karangan David Bery mendefinisikan “Peranan sebagai perangkat harapan- harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu.

Namun, lain lagi pengertian peranan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ia mengatakan bahwa “Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soerjono Soekanto, 2002:243). Peranan adalah perangkat harapan- harapan yang dikenakan pada

individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam- macam peranan yang berasal dari pola- pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan- kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat.

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243), peranan mencakup tiga hal, yaitu :

- a. Peranan meliputi norma- norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan- peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan yang dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa setiap individu atau kelompok yang dalam hal ini adalah dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, menjalankan peranan sesuai dengan norma- norma yang dihubungkan dengan posisi Dinas Kepemudaan dalam masyarakat, yang artinya

menjalankan peranan berdasarkan peraturan- peraturan yang membimbing Dinas Kepemudaan dalam proses pembangunan masyarakatnya, dalam hal ini penulis merujuk norma hukum berupa undang- undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah dan norma sosial yang apabila peranan ini dijalankan oleh Dinas Kepemudaan maka akan tercipta suatu hubungan yang memunculkan nilai pelayanan antara Dinas Kepemudaan dengan masyarakatnya yang disebut dengan lingkaran sosial (social circle), yang diikuti dengan apa yang dapat dilakukan dinas Kepemudaan dalam masyarakat. Selain itu, menurut Soekanto (2002: 243), pembahasab perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu- individu dalam masyarakat, penting bagi hal- hal sebagai berikut :

- a. Bahwa peranan- peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya;
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu- individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya;
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu- individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan- kepentingan pribadi yang terlalu banyak;
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang- peluang

yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang- peluang tersebut.

Begitu pentingnya peranan sehingga dapat menentukan status kedudukan seseorang dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Hal inilah yang hendaknya kita pikirkan kembali, karena kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan daripada peranan. Hal ini juga menunjukkan gejala yang lebih mementingkan nilai materialisme daripada sipiritualisme. Nilai materialisme dalam kebanyakan hal diukur dengan adanya atribut- atribut atau ciri- ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan didalam kebanyakan hal bersifat konsumtif. Tinggi rendahnya prestise seseorang diukur dari atribut- atribut lahirian tersebut.

6. Konsep Organisasi

Definisi organisasi banyak ragamnya, tergantung pada sudut pandang yang dipakai untuk melihat organisasi. Organisasi dapat dipandang sebagai wadah, sebagai proses, sebagai prilaku dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Namun demikian, definisi organisasi yang telah dikemukakan oleh para ahli organisasi sekurang- kurangnya ada unsur sistem kerja sama, orang bekerja sama dan tujuan bersama yang hendak dicapai.

Seperti kita ketahui bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa berdiri sendiri. Agar kebutuhan itu dapat terpenuhi, manusia harus berorganisasi dalam hal ini merupakan suatu alat organisasi yang diperlukan

dalam masyarakat, karena tujuan tertentu hanya dapat dicapai lewat tindakan yang harus dilakukan dengan kerjasama.

Ada beberapa pengertian dari beberapa ahli mengenai organisasi. Menurut Mc. Farland yang dikutip oleh Soewarno Handayani (1981:42) menyatakan definisi organisasi adalah sebagai berikut : “Organisasi adalah suatu kelompok manusia yang dapat dikenal yang mnyumbangkan usahanya terhadap tercapainya suatu tujuan”.

Sedangkan menurut Dimock yang dikutip oleh Soewarno Handayani (1981:43) menyatakan ciri- ciri organisasi sebagai berikut :

1. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal.
2. Adanya kegiatan yang berbeda- beda tapi satu sama lain saling berkaitan.
3. Tiap- tiap anggota memberikan sumbangan usahanya ataupun tenangnya.
4. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan.
5. Adanya suatu tujuan.

Berdasarkan teori- teori diatas maka pada dasarnya didalam suatu organisasi terdapat pola- pola hubungan yang saling berkaitan satu sama lain dan setiap individu dalam organisasi tersebut harus mampu menyumbangkan usahanya dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Dalam organisasi setiap individu dituntut untuk memiliki kemampuan sumber daya manusia karena faktor utama dari organisasi adalah sumber daya manusia

7. Konsep Pemuda

Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun nanti yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural.

Terdapat banyak definisi tentang pemuda, baik definisi secara fisik ataupun psikis tentang siapa figure yang pantas disebut pemuda serta apakah pemuda selalu diasosiasikan dengan semangat dan usia. Menurut Taufik Abdullah (1974;6) pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun cultural. Dalam hal ini, Princeton mendefinisikan kata pemuda (youth) dalam kamus websternya sebagai “the time of life between childhood and maturity; the state of being young or immature or inexperienced; the freshness and vitality characteristic of a young person”.

Menurut mukhlis (2007:1) “pemuda adalah suatu generasi yang dipundaknya dibebani bermacam-macam harapan, terutama dari generasi lainnya. Hal ini dapat dimengerti karena pemuda diharapkan sebagai generasi penerus, generasi yang harus mengisi dan melangsungkan estafet pembangunan secara berkelanjutan”.

Dalam Undang- undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 1 ayat (1) mendefinisikan bahwa “Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 Tahun”. Berdasarkan dari pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemuda adalah manusia yang berusia 16- 30 tahun yang secara biologi telah menunjukkan tanda- tanda kedewasaan.

Menurut Taufik Abdullah (1974:38) ada beberapa hakekat kepemudaan yang ditinjau dari dua asumsi :

1. Penghayatan mengenai proses perkembangan manusia bukan sebagai suatu kontinum yang sambung menyambung tetapi fragmentaris, terpecah- pecah dan setiap fragmen mempunyai artinya sendiri- sendiri. Pemuda dibedakan dari anak dan orang tua dan masing- masing fragmen itu mewakili nilai sendiri.
2. Merupakan tambahan dari asumsi wawasan kehidupan ialah posisi pemuda dalamarah kehidupan itu sendiri. Pemuda sebagai suatu subjek dalam hidup, tentulah mempunyai nilai sendiri dalam mendukung dan menggerakkan hidup bersama. Hal ini hanya terjadi apabila tingkah laku pemuda itu sendiri ditinjau sebagai interaksi dalam lingkungannya dalam arti luas. Ciri utama dari pendekatan ini melingkupi dua unsu pokok yaitu unsur lingkungan atau ekologi sebagai keseluruhan dan kedua, unsur tujuan yang menjadi oengarah dinamika dalam lingkungan itu. Keseimbangan antara manusia dengan lingkungannya adalah suatu keseimbangan yang dinamis, suatu interaksi yang bergerak. Arah gerak

itu sendiri mungkin kearah perbaikan mungkin pula kearah kehancuran. Ada beberapa kedudukan pemuda dalam pertanggung jawabannya atas tatanan masyarakat, antara lain :

- a. Kemurnian idealismenya;
- b. Keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap nilai- nilai dan gagasan- gagasan yang baru;
- c. Semangat pengabdianya;
- d. Spontanitas dan dinamikanya;
- e. Inovasi dan kreativitasnya;
- f. Keinginan untuk segera mewujudkan gagasan- gagasan baru;
- g. Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan kepribadiannya yang mandiri;
- h. Masih langkanya pengalaman- pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat, sikap dan tindakannya dengan kenyataan yang ada.

Definisi tentang pemuda diatas lebih pada definisi teknis berdasarkan kategori usia sedangkan definisi lainnya lebih flesibel. Dimana pemuda/ generasi muda/ kaum muda adalah mereka yang memiliki semangat pembaharuan dan progresif.

8. Konsep Pembinaan

Menurut Miftah Thoha (2003:7-9) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil ataupunnyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, perubahan, evolusi atas berbagai kemungkina,

berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Pembinaan selain menekankan aspek rasionalitas dan teknikal, juga sangat memberikan perhatian pada hubungan kemanusiaan dan kebutuhan sosialnya.

Menurut Widjaja (2001:139) mengatakan bahwa Pembinaan adalah proses pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha perbaikan dan akhirnya mengembangkan, dengan demikian pembinaan adalah sejauh mana usaha dari kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan program, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara berdaya guna dan berhasil mencapai tujuan dengan semaksimal mungkin.

Pembinaan menurut Winkel (2002:29) disebutkan bahwa pembinaan adalah bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa agar dia mencapai kedewasaan. Secara sederhana pembinaan merupakan suatu aktifitas sadar dari orang dewasa guna membantu dan membimbing orang yang belum dewasa agar menjadi dewasa, baik jasmani dan rohani.

Selain itu, menurut Efendi (2003:24) disebutkan bahwa Pembinaan adalah pendidikan dalam rangka perbaikan dan pembaharuan suatu kondisi pada orang perorangan, kelompok maupun dalam aspek bidang kehidupan tertentu secara langsung termasuk didalamnya bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang politik, sehingga dengan mulai pendidikan itu dapat mencapai titik maksimal.

Menurut Mangunhardjana (2004:17) mengatakan bahwa unsur- unsur dalam pembinaan harus memperhatikan hal- hal sebagai berikut :

1. Isi sesuai dengan tingkat perkembangan dan pengetahuan para peserta pembinaan maupun berhubungan dengan pengalaman mereka.
2. Isi tidak selalu teoritis, tetapi praktis dalam arti dapat dibahas dan dikembangkan dari berbagai pandangan dan pengalaman para peserta, dapat dipraktikkan dengan waktu yang tersedia

Penyalahgunaan bisa dihindari, jika para aparatur sebagai pelaksana dalam menjalankan proses pemerintahan secara konsisten menyadari tugasnya.

Adapun indikator variabel menurut Santoso S (2005:52) Pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi, agar pembinaan dapat berjalan baik, maka dilakukan beberapa cara :

- a. Pemberian Bimbingan

Pemberian Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada Individu. Pemberian Bimbingan bertujuan agar yang bersangkutan dapat mencapai taraf perkembangan dan kebahagiaan secara optimal. Dengan Pemberian Bimbingan kita dapat menjalani proses pengenalan, pemahaman, penerimaan, pengarahan, perwujudan, serta penyesuaian diri, baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungannya. Pemberian bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada Organisasi Kepemudaan secara terus menerus agar dapat mencapai kemandirian dalam pemahaman diri, sehingga dapat mengarahkan Organisasi Kepemudaan sesuai aturan yang berlaku.

b. Memberikan pengarahan

Memberikan Pengarahan merupakan perencanaan untuk mengikat para Organisasi Kepemudaan untuk bersedia menyumbangkan tenaga dan idenya secara efektif dan efisien untuk mencapai sebuah tujuan. Ada 3 cara untuk Memberi Pengarahan kepada Organisasi Kepemudaan yaitu Orientasi, Perintah dan Delegasi Wewenang.

c. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktifitas dan kesejahteraan. Tujuan Pendidikan dan Pelatihan yaitu Memperbaiki Kinerja, Memutakhirkan keahlian- keahlian Organisasi Kepemudaan, Mengurangi waktu pembelajaran bagi Organisasi Kepemudaan agar kompeten, Membantu memecahkan masalah Operasional dan Mempersiapkan Organisasi Kepemudaan untuk tujuan Pembangunan Daerah.

d. Memberikan Instruksi- Instruksi

Memberikan Intruksi merupakan pemberian perintah secara langsung ataupun tidak langsung kepada Organisasi Kepemudaan untuk melakukan sesuatu hal berdasarkan kemampuan masing- masing Organisasi.

e. Memberikan Buku Petunjuk

Memberikan Buku Petunjuk merupakan Memberikan referensi- referensi yang berkaitan dengan masing- masing Organisasi Kepemudaan untuk menjalankan visi dan misi.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

1	2	3	4	5
No	Nama	Judul Penelitian	Konsep Teori	Indikator
1.	Ariyanti Rahman	Peranan Pemerintah Dalam pengembangan Organisasi Kepemudaan Di Kota Manado (Studi Kasus Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Manado)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Pemerintahan 2. Konsep Peranan 3. Konsep Pengembangan 4. Konsep Pemuda 5. Konsep Organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan atau kemajuan (kinerja)sistem 2. Kepemimpinan yang enerjik 3. sarana dan prasarana
2.	Rommy Paat	Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dalam Pemberdayaan Generasi Muda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Kinerja 2. Konsep Generasi Muda 3. Konsep pemberdayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi Diaspora dengan jalur keluarga 2. Strategi Diaspora dengan jalur Organisasi Kepemudaan 3. Srategi Diaspora dengan jalur masyarakat 4. strategi diaspora dengan jalur lingkup lembaga pemerintahan lainnya
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ersas A. Gahung 2. T.A.M Ronny Gosal 	Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pemuda Di Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Peranan 2. Konsep Pemerintah 3. Konsep Pembrdayaan 4. Konsep Pemuda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan yang ramah dan aman 2. Keterlibatan dan komitmen

1	2	3	4	5
	3. Frans Singkoh	Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara		3. Keterlibatan Secara Sosial Politik Melakukan Perubahan 4. Terintegrasi Dalam Pemberdayaan Di Level Individial dan Masyarakat

Tabel diatas menjelaskan Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sebelum penulis melakukan penelitian:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ariyanti Rahman dalam jurnal Peranan Pemerintah Dalam pengembangan Organisasi Kepemudaan Di Kota Manado (Studi Kasus Tentang Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Manado). Persamaan Penelitan yang dilakukan oleh Ariyanti Rahman dengan yang penulis teliti adalah sama- sama membahas tentang peran Pemerintah terhadap Organisasi Kepemudaan, teori peran Soerjono Soekanto dan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif yang membedakannya adalah teori, indikator variable dan lokasi penelitian. Ariyanti Rahman menggunakan teori Pengembangan dengan lokasi di kabupaten Pinrang Kota Manado sedangkan penulis menggunakan teori Pembinaan Santoso S. dengan lokasi di Kota Dumai, Riau.
2. Penelitan yang dilakukan Rommy. Paat dalam penelitian Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dalam Pemberdayaan Generasi Muda. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rommy. Paat dengan yang penulis teliti yaitu sama menggunakan metode Kualitatif yang

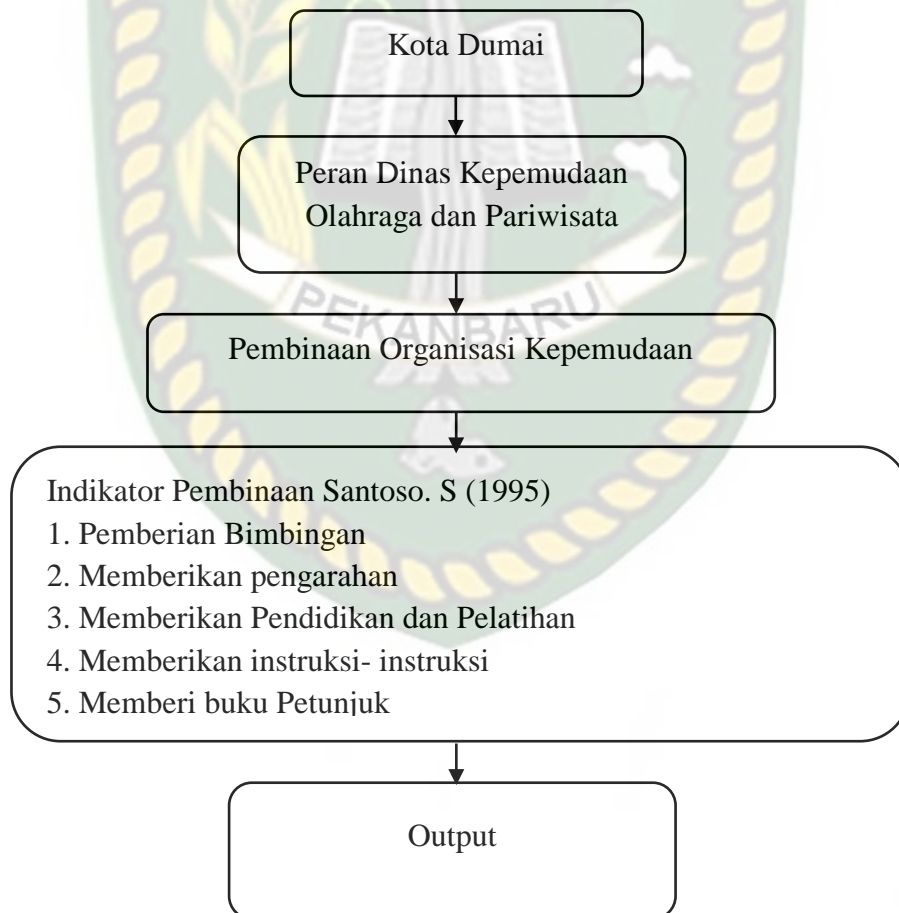
membedakannya adalah teori yang digunakan oleh Rommy. Paat adalah teori Kinerja dan Pemberdayaan dan Lokasi yang menjadi tempat penelitian Rommy. Paat berada di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara sedangkan Penulis melakukan penelitian di Kota Dumai, Riau

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ersas A Gahung, Ronny Gosal dan Frans Singkoh dalam penelitian tentang Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pemuda di Desa Liwitung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh mereka dengan yang penulis teliti adalah sama-sama mendeskripsikan Peran Pemerintah dengan Grand teori Peran dan menggunakan metode Kualitatif yang membedakannya adalah Teori dan Lokasi, teori yang digunakan yaitu Teori Pemberdayaan dari Jennings dan Lokasi yang diteliti berada di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara.

C. Kerangka Pikir

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sebagai pemimpin organisasi memegang tanggung jawab yang sangat besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Dumai. Dalam hal ini Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai harus benar- benar membina Organisasi Kepemudaan, sehingga nantinya tidak timbul hambtan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kota Dumai.

Gambar: Kerangka Pikir Tentang Peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kota Dumai



D. Konsep Operasioanal

Guna menghindari dari kekeliruan dalam penggunaan istilah didalam penulisan ini, maka berikut ini penulis akan mennuangkan konsep-konsep yang telah dipaparkan sebelumnya dalam bentuk nyata secara operasionalnya tentang hasil kajian sebagai berikut :

- a. Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, dalam penelitian ini diwakili Kota Dumai.
- b. Dinas adalah unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan mempunyai tugas Membina Organisasi Kepemudaan di Kota Dumai.
- c. Kepala Dinas adalah Kepala atau atasan tertinggi di Dinas yang bertugas menjalankan Tugas dan Fungsi dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.
- d. Pembinaan dalam penelitian ini adalah upaya perwujudan yang dilakukan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun indikator dalam variabel pembinaan sebagai berikut :
 1. Pemberian Bimbingan dalam penelitian ini adalah memberikan pengetahuan dalam berorganisasi, membantu dalam memecahkan masalah, memberikan masukan dan membimbing Organisasi Kepemudaan agar apa yang dikerjakan sesuai aturan yang berlaku.

2. Memberikan pengarahan dalam penelitian ini proses yang dilalui dalam Membina bawahan berupa menempatkan Organisasi Kepemudaan sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang ada pada organisasi. Mengarahkan Organisasi Kepemudaan agar fapat mengembangkan kemampuannya sesuai dengan yang diinginkan.
3. Memberikan pendidikan dan pelatihan dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan Diskopar dalam memberikan pelayanan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan Organisasi Kepemudaan.
4. Memberikan instruksi- instruksi dalam penelitian ini adalah menempatkan dan menjadikan Organisasi Kepemudaan berperan aktif dalam setiap kegiatan dan tujuan pembangunan.
5. Memberikan Buku Petunjuk dalam penelitian ini adalah memberikan petunjuk, referensi serta segala bentuk tulisan permasalahan dan cara menjalankan Organisasi Kepemudaan.

E. Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian dioperasikan sebagai berikut ini:

Tabel II.2 Operasional Tentang Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kota Dumai

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
1	2	3	4	5
Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	1. Pemberian Bimbingan	a. Membuat program bimbingan b. Memberikan petunjuk kepada Organisasi Kepemudaan	Baik Cukup Baik Kurang Baik

1	2	3	4	5
<p>hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soerjono Soekanto, 1990: 268)</p>			<p>c. Mengadakan diskusi bila terjadi keraguan dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan</p>	
		<p>2. Memberikan Pengarahan</p>	<p>a. Memberikan motivasi kepada Organisasi Kepemudaan b. Menempatkan Organisasi Kepemudaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki c. Memberikan apresiasi kepada organisasi kepemudaan yang berprestasi dan aktif</p>	
		<p>3. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan</p>	<p>a. Menghimbau dan mengajak serta mendaftarkan organisasi yang terdaftar untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan b. memudahkan Organisasi</p>	

1	2	3	4	5
			<p>Kepemudaan untuk ikut serta dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan</p>	
		<p>4. Memberikan Instruksi-Instruksi</p>	<p>a. Mengerahkan Organisasi-Organisasi Kepemudaan untuk ikut dalam kegiatan pemerintahan b. Memberikan wadah untuk Organisasi Kepemudaan untuk menjalankan fungsi organisasinya c. Menggerakkan Organisasi Kepemudaan untuk tujuan pembangunan</p>	
		<p>5. Memberikan Buku Petunjuk</p>	<p>a. Memberikan referensi untuk menjalankan organisasi Kepemudaan b. Memberikan dasar mereka untuk menjalankan fungsi Organisasi Kepemudaan c. Memberikan dasar mereka</p>	

1	2	3	4	5
			untuk menjalankan fungsi Organisasi Kepemudaan d. Menyadarkan mereka pentingnya Organisasi untuk tujuan pembangunan	



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang ada tersebut bahwa data dan informasi yang akan dikumpulkan adapun tipe penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Menurut (Surtabrata, Sumardi. 2002) Deskriptif adalah untuk membuat percandraan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta- fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Untuk member arti dan makna pemecahan masalah, menggunakan analisis data kualitatif, sehingga fakta yang terjadi dilapangan dapat dijelaskan sebagaimana mestinya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menjadikan teori sebagai bingkai kerja dari keseluruhan penelitian. (Efendy, Khasan. 2010).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kota Dumai karena penulis menemui Peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan belum berjalan dengan baik.

C. Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informasn yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah pelaku atau orang yang benar- benar tahu dan menguasai masalah dan informasi.

Adapun teknik penunjukan informan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk

mengetahui serta memahami masalah. Adapun yang menjadi Informan penelitian ini adalah Kepala Bidang Kepemudaan, Seksi Organisasi Kepemudaan, Seksi Pemberdayaan Pemuda, Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan Organisasi Kepemudaan.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari para responden melalui penelitian lapangan tentang Peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan. Data yang diperoleh melalui penyebaran quisioner (angket) dan hingga melakukan interview
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua yang berupa keterangan- keterangan relevan yang dapat menunjang objek dalam penelitian ini berupa :
 - a. Keadaan Geografis
 - b. Keadaan Monografi
 - c. Struktur Organisasi Diskopar
 - d. Tugas dan Fungsi

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data- data dan informasi yang lengkap dan dibutuhkan penulis sebagai ajukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterikatan data yang baik secara langsung terhadap fokus penelitian yaitu :

- a. Observasi, menurut Usman (2009:59) teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala- gejala yang teliti. Teknik ini dilakukan dengan cara dating, pendekatan dan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data- data awal dan data sekunder.
- b. Wawancara, menurut Riduan (2009:29) wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab kepada pihak- pihak dengan alasan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data.
- c. Dokumentasi, menurut Riduan (2009:31) teknik Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku- buku yang relevan, peraturan- peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan. Teknik ini digunakan ini digunakan untuk mendapatkan konsep teori penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam peneliti ini adalah analisis deskriptif yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya sesuai dengan gejala- gejala dan permasalahan yang timbul dilapangan kemudian dilakukan intervensi sehingga memperoleh sebuah kesimpulan dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Dumai

1. Sejarah Singkat Kota Dumai

Kota Dumai merupakan salah satu dari 12 Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau ditinjau dari letak geografis. Kota Dumai terletak antara $101^{\circ}23'37''$ – $101^{\circ}8'13''$ Bujur Timur dan $1^{\circ}23'23''$ – $1^{\circ}24'23''$ Lintang Utara dengan Luas Wilayah 1.727,38 Km². Kota Dumai memiliki Tujuh (7) Kecamatan dan 40 Kelurahan. Batas Administratif Kota Dumai sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir

Kota Dumai adalah sebuah Kota di Provinsi Riau, Indonesia sekitar 188 Km dari Kota Pekanbaru. Kota Dumai memiliki luas wilayah 1.727,38 Km². Sebelumnya Kota Dumai merupakan Kota terluas Nomor 2 (dua) di Indonesia setelah Manokwari. Namun semenjak Manokwari pecah dan terbentuk Kabupaten Wasiun, maka Kota Dumai pun menjadi yang terluas. Tercatat dalam sejarah. Dumai adalah sebuah dusun kecil di Pesisir Timur Sumatera. Nama Dumai menurut cerita Rakyat tentang putri Tujuh, berasal dari Kota di Lubuk dan Umai (Sejenis Binatang Landak) yang mendiami lubuk tersebut. Karena diucapkan cepat, lama kelamaan kata- kata tersebut bertaut menjadi D' Umai dan selanjutnya menjadi Dumai.

Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, diresmikan sebagai Kota pada 20 April 1999, dengan UU No. 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai tanggal 20 April 1999, setelah sebelumnya sempat menjadi Kota Administratif (kotif) di dalam Kabupaten Bengkalis. Pada awal pembentukannya, Kota Dumai hanya terdiri atas 3 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 9 Desa dengan jumlah penduduknya 15. 699 Jiwa dengan tingkat kepadatan 83, 85 Jiwa/Km². Saat ini Kota Dumai sebagai Kota yang masuk dalam zona Pasar Bebas International. Dulu Dumai hanyalah sebuah dusun nelayan yang sepi, berada di Pesisir Timur Provinsi Riau, Indonesia. Kini, Dumai sangat ramai sejak tahun 1999. Kapal- kapal tangka minyak raksasa setiap harinya singgah dan merapat di pelabuhan ini. Kilang- kilang minyak yang tumbuh menjamur di sekitar pelabuhan menjadi Kota Dumai malam hari gemerlapan bak permata berkilauan.

Pada era 1930-an. Dumai merupakan suatu dusun nelayan kecil yang terdiri atas beberapa rumah nelayan. Penduduknya bertambah ketika Jepang mendatangkan kaum Romusha (Pekerja Paksa Zaman Penjajahan) dari Jawa. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan status Dumai sebagai berikut :

1. Tahun 1945- 1959, Status Dumai tercatat sebagai Desa.
2. Tahun 1959- 1963, Dumai masuk dalam wilayah kecamatan Rupert.
3. Tahun 1963- 1964, Dumai berpisah dari Kecamatan Rupert dan berubah status menjadi kewadanan.

4. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 1979 Tentang Pembentukan Kota Administratif Dumai tertanggal 11 April 1979, Dumai berubah menjadi Kota Administratif (merupakan kota Administratif pertama di Sumatera dan ke- 11 di Indonesia) dibawah Kabupaten Daerah Tingkat (Dati) II Bengkalis.
5. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai tanggal 20 April 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 3829), Dumai berubah menjadi Kota Madya sehingga menjadi Kota Madya Dati II Dumai. Seiring perkembangan politik Indonesia, berdasar UU No. 22 Tahun 1999 maka Kota Madya Dumai berubah menjadi Kota Dumai. Maka jabatan Walikota Dumai pertama dari tanggal 27 April dijadikan hari Ulang Tahun Kota Dumai.
6. Terdapat beberapa filosofis yang cukup mendasar atas peningkatan status Kota Dumai dalam tatanan pengelolaan wilayah administrative pemerintahan, diantaranya adalah untuk memperpendek tentang kendali pemerintahan, mempercepat tingkat pelayananserta memperbesar peran dari masyarakat dalam upaya pembangunan pemerintahan.

Pengelolaan Proses pembangunan dan upaya pemberdayaan masyarakat , disamping itu juga untuk menangkap berbagai peluang dan pengembangan ekonomi. Didalam sejarah Kota Dumai pernah menjadi Kota paling luas Nomor 2 (Dua) di Indonesia setelah Manokwari di Papua. Akan tetapi,

semenjak Kota Manokwari pecah dan kemudian terbentuk Kabupaten Wasior, maka Kota Dumai menjadi Kota Terluas di Indonesia. Dalam catatan sejarah, Dumai merupakan sebuah dusun kecil di daerah Pesisir Timur Pulau Kota Dumai juga dijuluki dengan Kota Pengantin Berseri adalah singkatan dari (Pelabuhan, Perdagangan, Tourism dan Industri) Berseri (Bersih, Semarak, Rukun dan Indah).

2. Topografi

Secara geografis, Kota Dumai terletak di 1023-1024'23" Bujur Timur dan 101023'37"-101028'13 Lintang Utara dengan batas wilayah sebelah Utara. Dumai berbatasan dengan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis sebelah Timur. Dumai berbatasan dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis dan Sebelah Barat, Dumai berbatasan dengan Kecamatan Bangko dan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Wilayah Kota Dumai beriklim Tropis dengan curah hujan antara 100-300 cm dan suhu udara 24-33°C dengan kondisi tanah rawa bergambut. Periode musim kering (musim kemarau) biasanya terjadi antara bulan Februari hingga Agustus.

3. Pemerintahan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, Dumai Barat merupakan wilayah administratif Kota Dumai yang memiliki 4 Kelurahan dan mempunyai jumlah penduduk 47.364 jiwa. Pada setiap kelurahan dipimpin oleh Seorang Lurah, dalam menjalankan tugasnya, lurah dibantu

oleh beberapa stafnya dan telah dilengkapi dengan kepala urusan yang membantu dalam urusan pemerintahan.

4. Penduduk

Masalah penduduk dikecamatan Dumai Barat sama halnya dengan Daerah lain. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang kurang terkendali, sulit tercapai Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang harus ditingkatkan. Penduduk di Kecamatan Dumai Barat pada tahun 2019 berjumlah 47.364 jiwa, yang terdiri dari 21. 269 jiwa penduduk laki- laki dan 21. 095 jiwa penduduk perempuan.

5. Sosial

a. Pendidikan

Berhasil atau tidak berhasilnya suatu pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia yang dimilikinya, semakin maju pendidikan akan meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah tersebut. Demikian pentingnya peranan pendidikan, maka sudah sewajarnya pemerintah memberi perhatian yang lebih untuk dunia pendidikan.

b. Pertanian dan Perkebunan

Tanam pangan meliputi luas panen dan produksi tanaman bahan makanan sayur- sayuran dan buah- buahan diperoleh dari Dinas Pertanian, perkebunan dan kehutanan Kota Dumai. Sedangkan

perkebunan mempunyai kedudukan yang penting didalam pengembangan pertanian baik ditingkat nasional maupun regional. Jenis tanaman pangan dan perkebunan yang ada di Kota Dumai yaitu Padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Tanaman perkebunan yang merupakan tanaman yang sangat potensial di Daerah ini adalah kelapa Sawit. Sungai Sembilan merupakan penghasil sawit terbesar, sedangkan untuk penghasil padi terbesar juga terdapat pada Kecamatan Sungai Sembilan.

c. Peternakan

Pembangunan sub sector peternakan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat di samping meingkatkan pendapatan peternakan. Di kecamatan Dumai Barat terdapat ternak sapi dan kambing sekitar 1.124 ekor dan Kambing 2.006 ekor.

d. Industri

Kota Dumai terkenal dengan sebutan Kota Tambang Minyak, bermula dari serikat Indonesia standar oil California (Socal) atau PT. CPI menetapkan kawasan pantai Dumai sebagai alternatif pelabuhan untuk mengembangkan industrinya. Hal ini berdampak positif terbukti dari tahun ke tahun kawasan ini berkembang pesat. Perkembangan berbagai bidang industry ini juga didukung dengan adanya beberapa kawasan industry yang disebut dengan Kawasan Industry Dumai (KID) yaitu terdiri dari kawasan industry pelintung seluas 5.008 hektar,

kawasan industry Lubuk Gaung yang terdapat disungai sembilang seluas 2.158 hektar, kawasan indutri bukit kapur di Kecamatan Bukit Kapur seluas 115 hektar dan kawasan industry Terpadu Dock Yard sekuas 300 hektar.

B. Gambaran Umum Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

1. Sejarah Singkat Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

Kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) tahun 2005 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Dasar pertimbangan dibentuknya Dinas tersebut adalah Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melakukan ketentuan pasal 11 Undang- undang tersebut dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Penyusunan kelembagaan perangkat daerah saat ini, mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yang ada prinsipnya sebagai arah yang jelas dalam menata organisasi Daerah kota Dumai. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Peraturan Daerah (Perda) tersebut dibentuk, yang ditetapkan tanggal 6 Desember 2005 oleh Walikota Dumai.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kepemudaan

Bidang Kepemudaan merupakan suatu unsur Pemerintahan yang mempunyai tugas pokok menjalankan kegiatan pemerintahan terutama dalam Bidang Kepemudaan. Maka dari itu diperlukan susunan organisasi dan tata kerja yang baik guna menyelenggarakan tugas Pemerintahan dan pelayanan masyarakat secara terperinci dan sistematis. Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai No. 63 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. Pada bagian

Susunan Organisasi Bidang Kepemudaan terdiri dari :

- a. Seksi Organisasi Kepemudaan
- b. Seksi Pemberdayaan Pemuda
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda

Adapun uraian tugas masing- masing seksi- seksi pada Bidang Kepemudaan dibawah ini :

- a. Seksi Organisasi Kepemudaan
 1. Seksi Organisasi Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan tentang pembinaan dan pengembangan pemuda
 2. Uraian tugas seksi Organisasi Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana berikut:

- a. Mengumpulkan bahan informasi dan mempelajari peraturan perundang- undangan, kebijakan dan teknis yang berhubungan dengan pemuda;
 - b. Menginventarisasi masalah kepemudaan;
 - c. Menghimpun, mengelola data kegiatan pemuda dan olahraga pemuda yang meliputi Kepramukaan, Karang Taruna, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Palang Merah Remaja (PMR), Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka), Drum Band serta penyelenggaraan Pembinaan kegiatan;
 - d. Membina pengembangan kepemudaan, produktifitas dan kewirausahaan, wawasan dan potensi pemuda;
 - e. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi data pengelolaan, pemberian perizinan pendirian dan akreditasi lembaga kepemudaan;
 - f. Menyiapkan dan melaksanakan perencanaan, analisis, evaluasi, bimbingan teknis bidang pengembangan kegiatan anak remaja dan kepemudaan;
 - g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja internal/ external untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. Menyusun laporan kegiatan bidang kepemudaan;
 - i. Menyiapkan bahas tugas- tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Seksi Pemberdayaan Pemuda

1. Seksi Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan produktifitas dan kreativitas pemuda.

2. Uraian tugas seksi Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan tugas- tugas tertentu dan oemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. Memantau, mengawasi dan megevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas- tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

d. Menyusun desain dan kerangka acuan teknis kegitanan peningkatan pemberdayaan dan produktifitas pemuda;

e. Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan pengembangan produktifitas pemuda pada tingkat kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;

f. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan fasilitasi promosi kreatifitas dan kewirausahaan pemuda;

g. Melakukan pembinaan teknis dan pendampingan dalam rangka pengembangan kreativitas dan kewirausaan pemuda;

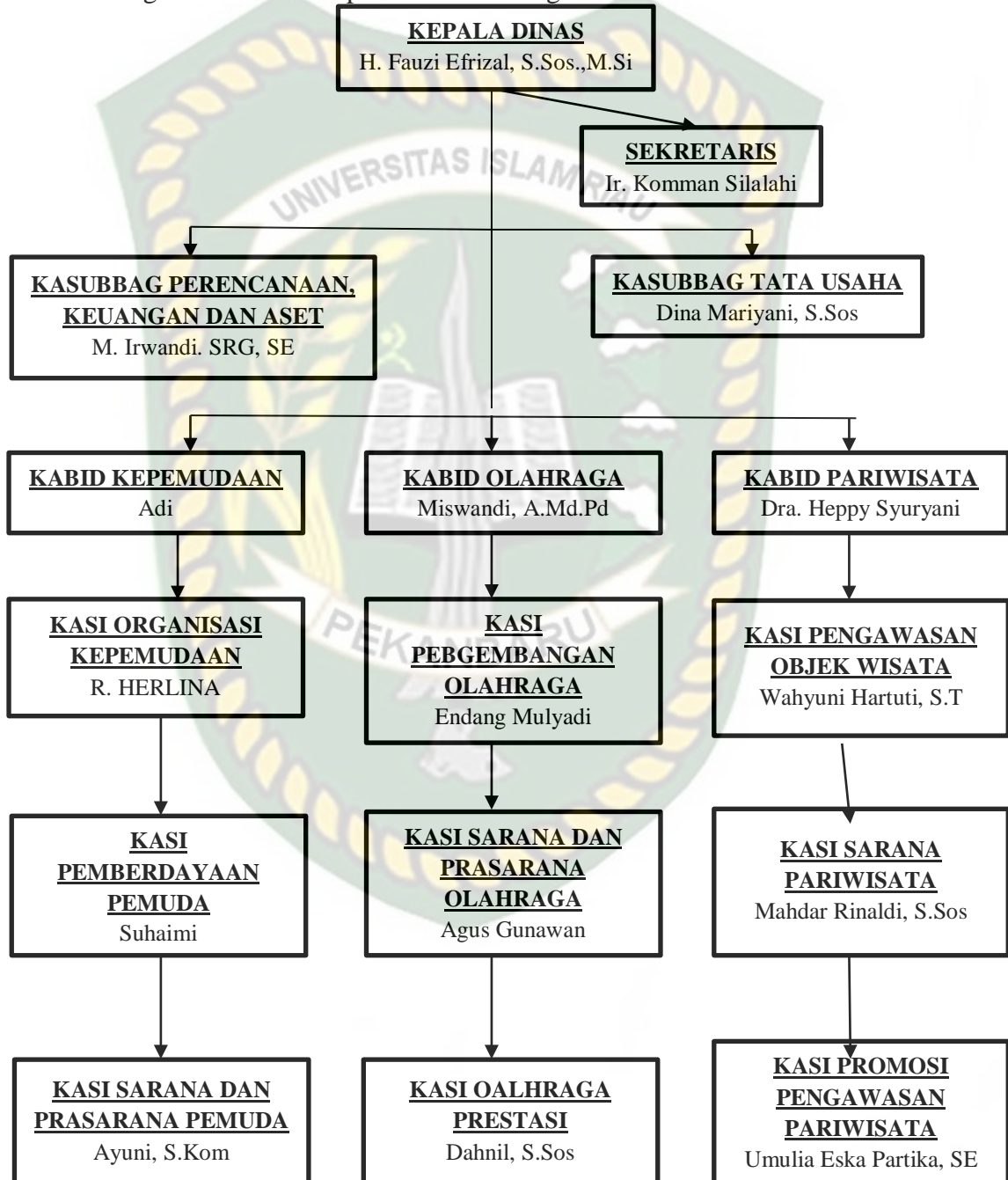
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahas perumusan kebijakan; dan
 - i. Menyiapkan bahas tugas- tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana
- 1. Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasaranan Kepemudaan dalam bidang tugasnya;
 - b. Menyusun kegiatan;
 - c. Mendata keberadaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
 - d. Melaksanakan pengadaan dan pembangunan sarana dan prasaranan Kepemudaan;
 - e. Memelihara dan mengawasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
 - f. Mengoperasikan dan mengendalikan penggunaan sarana dan Prasarana Kepemudaan;
 - g. Menyiapkan bahas tugas- tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

C. Struktur Organisasi

Dengan struktur tugas masing- masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi- misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran didalamnya. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Dumai No. 12

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai, maka struktur Organisasi Kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Gambar IV. I
Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai



Sumber : Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2019

D. Sumber Daya Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

Keberhasilan pencapaian kinerja Organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja Sumber Daya Manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing- masing. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, professional, berpengalaman serta memiliki pengalaman dalam mengelola sesuatu organisasi atau lembaga merupakan factor utama agar organisasi dapat berjalan secara optimal.

Sebagai bagian dari perangkat kerja Pemerintah Kota Dumai, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai sebanyak 33 Orang. Berdasarkan Komposisi dan jumlah personil lingkup Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai tergambar sebagai berikut :

Tabel IV.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

No	Jenis Kelamin	Golongan							Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	DIII	S-1	S-2	S-3	
1	Laki- Laki	0	0	2	2	10	2	0	16
2	Perempuan	0	0	4	4	9	0	0	17
Jumlah		0	0	6	8	18	1	0	33

Tabel IV.2 Komposisi pegawai Berdasarkan Jumlah Pejabat Eselon :

No	Jenis Kelamin	Eselon				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Laki- Laki	0	1	3	8	12
2	Perempuan	0	0	1	5	6
Jumlah		0	1	4	13	18

Sumber : Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai 2019

Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan Honor Kantor berjumlah 16 Orang :

- S1 : 5 Orang
- D3 : 2 Orang
- SLTA : 9 Orang



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

E. GAMBARAN UMUM ORGANISASI KEPEMUDAAN

Kota Dumai dalam Data yang diambil dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai 47 Organisasi Kepemudaan. Dalam Penelitian ini penulis mengambil 8 Organisasi Kepemudaan diantaranya :

Tabel IV. 3 Daftar Organisasi Kepemudaan yang menjadi subjek Penelitian

NO	Nama Organisasi
1	KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia)
2	Pramuka (Praja Muda Karana)
3	PPI (Purna Paskibraka Indonesia)
4	PMI (Palang Merah Indonesia)
5	HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia)
6	Marching Band Gitawibawa Praja
7	Pemuda Pancasila
8	FPI (Front Pembela Islam)

1. KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia)

KNPI atau Komite Nasional Pemuda Indonesia adalah Induk Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dan juga wadah behimpun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Indonesia. Di Kota Dumai sendiri terdapat 46 Organisasi Kepemudaan yang berada dibawah Koordinasi KNPI Kota Dumai. Di antaranya :

Tabel IV. 4 Daftar Organisasi Kepemudaan dibawah Koordinasi KNPI

1	2
NO	NAMA
1	FATAYAT NU
2	NASYIATUL AISYIYAH
3	SATRIA
4	BARISAN PEMUDA PENEGAK AMANAT NASIONAL
5	GERAKAN PEMUDA KA'BAH
6	DPC GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA
7	DPC GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA
8	DPD BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MESJID INDONESIA

1	2
9	PIMPINAN CABANG GERAKAN PEMUDA ANSOR
10	ANGKATAN MUDA KA'BAH
11	LEMBAGA SRIKANDI PEMUDA PANCASILA
12	DPD BARISAN BENTENG RIAU
13	PC GENERASI MUDA PEMBANGUNAN INDONESIA
14	IKATAN PUTRA NADRATUL ULAMA
15	DPD GM MUSYAWARAH KELUARGA GOTONG ROYONG
16	PIMPINAN CABANG GENERASI MUDA PERSATUAN
17	DPC GERAKAN PEMUDA AL WASHLIYAH
18	DPD IKATAN PUTRA PUTRI INDONESIA
19	DPD GARDA MUDA MERAH PUTIH
20	DPD PEMUDA TANI INDONESIA
21	DPD ANGKATAN MUDA DEMOKRAT INDONESIA
22	DPD IKATAN PEMUDA KARYA
23	DPD GERAKAN MAHASISWA KOSGORO
24	DPD GERAKAN PEMUDA SEHAT
25	DPD HIMPUNAN PEMUDA AL KHAIRAT
26	DPD GERAKAN PEMUDA ISLAM INDONESIA
27	KAWULA MUDA FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI ADHYAKSA
28	DPD GENERASI MUDA KIARA
29	DPD GENERASI MUDA GAKARI
30	IKATAN PEMUDA TARBIYAH ISLAMİYAH
31	DPD ANGKATAN MUDA THAREQAT ISLAM
32	KNPI KECAMATAN DUMAI KOTA
33	KNPI KECAMATAN DUMAI TIMUR
34	KNPI KECAMATAN DUMAI BARAT
35	KNPI KECAMATAN DUMAI SELATAN
36	KNPI KECAMATAN PINANG KAMPAI
37	KNPI KECAMATAN BUKIT KAPUR
38	KNPI KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
39	DPD MAHASISWA PEMBANGUNAN INDONESIA
40	DPD GENERASI MUDA GABUNGAN RAKYAT INDONESIA
41	PENGURUS WILAYAH GENERASI MUDA PERSAUDARAAN MUSLIMIN INDONESIA
42	DPW GENERASI MUDA SRIWIJAYA
43	DPD GENERASI MUDA KOSGORO

1	2
44	MPW GERAKAN PEMUDA SEHAT PROV. RIAU
45	DPW GARDA MUDA MERAH PUTIH
46	DPP GERAKAN MAHASISWA KOSGORO PROV. RIAU

Sumber : Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Dumai Tahun 2019

Organisasi yang terlampir diatas mempunyai hak suara dalam pemilihan kepengurusan KNPI periode berikutnya. Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI memiliki batas masa jabatan 3 (Tiga) tahun sekali, melalui proses Kongres di Nasional, Musyawarah Daerah KNPI Provinsi dan Kota (Musda). Koordinasi Antara KNPI Kota dengan Organisasi Kepemudaan yang terlampir diatas berbentuk Rapat Kerja (Raker) dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Komite Nasional Pemuda Indonesia berada dibawah koordinasi Pemerintah Daerah melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Bentuk Koordinasi antara Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai terhadap Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) berbentuk Rekomendasi untuk mendapatkan Anggaran Dana Hibah ditujukan ke Kesra.

2. Pramuka (Praja Muda Karana)

Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan nonformal sebagaimana UU RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan berstatus badan hukum. Gerakan Pramuka memiliki Hari Nasional yaitu tanggal 14 Agustus.

Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka:

- a. Memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani, dan rohani;

- b. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan.

Gerakan Pramuka bersifat independen, biarpun mereka bergerak dibidang pemuda tetapi mereka tidak dibawah Koordinasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Gerakan Pramuka ini berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam hal bantuan dana untuk melaksanakan program kegiatan yang telah mereka rencanakan.

3. PPI (Purna Paskibraka Indonesia)

Purna Paskibraka Indonesia adalah Organisasi Kepemudaan tempat berhimpunnya para Purna Paskibraka. Organisasi ini didirikan pada tanggal 21 Desember 1989.

Tujuan Organisasi ini untuk :

1. Menghimpun dan Membina para anggota agar menjadi warga negara Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, setia dan patuh pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi Pandu Ibu Pertiwi.
2. Mangamalkan dan Mengamankan Pancasila
3. Membina watak kemandirian dan profesionalisme, memelihara dan meningkatkan persaudaraan, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan, mewujudkan kerja sama yang utuh serta jiwa pengabdian kepada bangsa

dan negara, memupuk rasa tanggung jawan dan daya cipta yang dinamis serta kesadaran nasioanal di kalangan para anggota dan keluarganya.

4. Membentuk manusia Indonesia yang memiliki ketahanan mental tangguh, cukup pengetahuan dan kemahiran teknis untuk dapat berguna bagi bangsa dan Negara.

Purna Paskibraka Indonesia atau PPI Kota Dumai berkoordinasi langsung kepada Pemerintahan Daerah melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Dalam hal ini Paskibraka sendiri masuk dalam program rutin dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melalui Surat Keputusan yang diturunkan langsung oleh Walikota Dumai saat melaksanakan Rencana Kerja Daerah Kota Dumai Tahun 2015- 2020.

4. PMI (Palang Merah Indonesia)

Palang Merah Indonesia adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik.

PMI adalah organisasi kemanusiaan yang berstatus badan hukum, diundangkan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan guna menjalankan kegiatan Kepalangmerahan sesuai dengan konvensi Jenewa tahun 1949.

PMI didirikan di Jakarta, tanggal 17 September 1945, oleh pemerintah Republik Indonesia.

Palang Merah Indonesia (PMI) Berkoordinasi langsung oleh Pemerintahan Daerah melalui Dinas Kesehatan berbentuk Rekomendasi Bantuan Dana Hibah.

Jadi, PMI ini tidak berada dibawah Koordinasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melainkan berada dibawah Koordinasi Dinas Kesehatan Kota Dumai.

5. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

HMI didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947 untuk waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di tempat Pengurus Besar.

HMI memiliki tujuan Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata'ala, dengan usaha sebagai berikut :

1. Membina pribadi muslim untuk mencapai akhlaqul karimah.
2. Membina pribadi muslim yang mandiri.
3. Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial dan budaya.
4. Mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan masa depan umat manusia.
5. Memajukan kehidupan umat dalam mengamalkan Dienul Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Memperkuat ukhuwah Islamiah sesama umat Islam se-dunia.
7. Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi dan kepemudaan untuk menopang pembangunan nasional.
8. Ikut terlibat aktif dalam penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan.

9. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan ayat (1) s.d. (7) dan sesuai dengan azas, fungsi, dan peran organisasi serta berguna untuk mencapai tujuan organisasi.

HMI bersifat Independen biarpun mereka dibawah Koordinasi dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, HMI lebih memilih mencari sumber pendanaan mereka dari Para Alumni yang tergabung dalam KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam).

6. Marching Band Gitawibawa Praja

Marching Band Gitawibawa Praja adalah kumpulan Remaja dan Pemuda yang memainkan alat musik. Marching Band ini langsung di bina oleh Walikota Dumai melalui Surat Keputusan ditujukan kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan di letakkan pada Program Rutin Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk 1 Periode.

Kepengurusan dari Marching Band ini langsung dari Staff Kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, segala pendanaan sudah dianggarkan dalam Program Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dibidang Kepemudaan.

7. Pemuda Pancasila (PP)

Organisasi Pemuda Pancasila adalah sebuah Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan tahun 1959. Bertujuan untuk melestarikan NKRI dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera materiil dan spirituil berazaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945.

Organisasi Pemuda Pancasila bersifat independen, patriotik, militan, inovatif, mandiri, persaudaraan, kreatif, dan terbuka tanpa mempermasalahkan perbedaan ras, suku, agama, golongan, profesi, dan status sosial.

Organisasi Pemuda Pancasila adalah Organisasi Kemasyarakatan dan buka termasuk dalam Organisasi Kepemudaan yang ada pada file Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

Organisasi Pemuda Pancasila mempunyai Organisasi Binaan yang berbentuk Kepemudaan yaitu :

1. Satma PP (Satuan Mahasiswa Pemuda Pancasila)
2. Srikandi PP (Wanita- Wanita Pemuda Pancasila)

Jadi, Pemuda Pancasila ini termasuk dalam Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas dan tidak termasuk dalam Organisasi Kepemudaan. Organisasi Kepemudaan binaan dari Pemuda Pancasila tergabung dibawah Koordinasi dari Komite Nasional pemuda Indonesia (KNPI).

8. Front Pembela Islam (FPI)

Organisasi FPI untuk pertama kalinya dicetuskan di Petamburan – Jakarta dan dideklarasikan secara terbuka di Pondok Pesantren Al-Umm – Ciputat – Tangerang pada tanggal 25 Robi'uts Tsani 1419 Hijriyyah bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1998 Miladiyyah, untuk jangkawaktu yang tidak ditentukan lamanya.

FPI adalah Organisasi Kemasyarakatan yang independen, FPI bukan termasuk kedalam Organisasi Kepemudaan sama halnya dengan Pemuda

Pancasila. FPI juga mempunyai anak Organisasi yang bergerak dibidang Kepemudaan yaitu :

1. Laskar Pembela Islam (LPI)
2. Mujahidah Pembela Islam (MPI)
3. Front Mahasiswa Islam (FMI)
4. Serikat Pekerja Front (SPK)

Organisasi Kepemudaan tersebut adalah binaan langsung dari Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam yang bersifat Independen dan mengacu pada Visi dan Misi dari Front Pembela Islam (FPI). Organisasi Kepemudaan tersebut juga tidak masuk dibawah Koordinasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Front Pembela Islam berada dibawah Koordinasi Majelis Ulama Indonesia.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kota Dumai, maka dijelaskan berdasarkan uraian berikut ini :

A. Informen

Informan yang terdapat didalam penelitian ini menurut data yang diperoleh melalui wawancara. Pemilihan informan didasari atas kepentingan penelitian, mengingat jumlah yang dimaksud sudah penulis anggap memberikan jawaban dari fenomena yang terjadi saat itu.

1. Jenis Kelamin

Data informan menurut jenis kelamin ini perlu diturunkan sebagai bahan analisis factor- factor yang mempengaruhi variable penelitian, khususnya dalam mengetahui sejauh mana Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kota Dumai.

Distribusi informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada table ini :

Tabel V.1 Jenis Kelamin Informan

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki- Laki	11
2	Perempuan	2
Jumlah		13

Sumber : modifikasi penulis, 2019

2. Pendidikan

Secara teoritis pendidikan terakhir akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat dilakukan penelitian. Mengingat penelitian merupakan penelitian lapangan dengan melibatkan beberapa unsur, maka informan berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan pada table berikut :

Tabel V.2 Pendidikan Informan

NO	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	Tidak Sekolah	-
2	SD	-
3	SMP	-
4	SMA	3
5	D-1 – D-3	-
6	S-1	6
7	S-2	4
8	S-3	-
Jumlah		13

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

3. Usia Informen

Dalam menentukan informen juga dilihat factor usia, dengan pertimbangan jawaban yang diberikan akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan. Semakin tinggi tingkat usia maka keputusan yang diambil sehubungan dengan jawaban yang diinginkan akan semakin baik atau tepat dengan pemikiran yang matang.

Selanjutnya tingkat usia sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan setiap aktifitas dalam hidupnya, dikarenakan tingkat usia selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang dan juga mempengaruhi pola pikir dan standar kemampuan fisik dalam suatu

pekerjaan. Tingkat usia informen dalam penelitian ini dapat diterangkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel V.3 Usia Informan

No	Umur	Jumlah
1	20- 30	2
2	31- 40	6
3	41- 50	4
4	51- 60	1
Jumlah		13

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

B. Hasil Penelitian dan Observasi Peneliti di Lapangan

1. Memberikan Bimbingan

Bimbingan adalah pertolongan yang diberikan oleh seorang individu untuk menolong individu lain dalam membuat keputusan ke arah yang dituju, dan mencapai tujuannya dengan cara yang paling baik.

Memberikan Bimbingan berarti memberikan pemahaman dalam berorganisasi, membuat Organisasi Kepemudaan mengerti akan peraturan-peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memberikan Bimbingan juga berarti memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh Organisasi Kepemudaan bias berupa Dana Anggaran, Barang dan lain- lain.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Bapak Adi Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Bimbingan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di Kota Dumai untuk Organisasi Kepemudaan :

“Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata memang belum menyeluruh, dikarenakan Anggaran untuk

Memberikan Bimbingan kepada Organisasi Kepemudaan begitu Minim dan bisa dibilang tidak pernah di anggarkan. Saat ini Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai Program Rutin yang telah di tentukan di Rencana Kerja yaitu Pembinaan Paskibraka dan Marching Band. Bimbingan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk Organisasi diluar Program rutin tersebut hanya berupa Rekomendasi untuk mendapatkan Dana Hibah. Organisasi Kepemudaan yang kita berikan rekomendasi Dana Hibah yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia dan Pramuka. Sedangkan untuk Palang Merah Indonesia direkomendasi oleh Dinas Kesehatan”

Selanjutnya dari hasil wawancara yang penulis lakukan, menurut Bapak Jasa selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Memberikan Bimbingan Kepada Organisasi Kepemudaan.

“Bimbingan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata masih hanya dalam Program rutin yaitu Organisasi Paskibraka dan Marching Band, untuk Organisasi lain Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata hanya memberikan rekomendasi untuk mendapatkan Bantuan Dana Hibah. Organisasi Kepemudaan yang mendapatkan Rekomendasi untuk mendapatkan dana hibah yaitu Pramuka, KNPI dan Karang Taruna tetapi Karang Taruna saat ini belum kembali aktif jadi saat ini Karang Taruna belum bisa di berikan bantuan Dana Hibah.”

Selanjutnya dari hasil wawancara yang penulis lakukan, menurut Ibu R. Herlina sebagai Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Memberikan Bimbingan kepada Organisasi Kepemudaan.

“Di Bidang Kepemudaan ini untuk program khusus Organisasi Kepemudaan memang tidak ada, kami hanya menjalankan Program Rutin yang diberikan langsung dari Surat Keputusan (SK) Walikota Dumai untuk membimbing Marching Band dan Paskibraka. Selain dari pada itu kami tidak ada anggaran dan tidak menganggarkan, kami hanya memberikan rekomendasi untuk mendapatkan dana Hibah”

Selanjutnya dari hasil wawancara yang penulis lakukan, menurut Ibu Ayuni selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk Memberikan Bimbingan Kepada Organisasi Kepemudaan.

“Saat ini Bidang Kepemudaan hanya focus kepada program rutin, karena anggaran yang kami dapatkan tidak cukup untuk diluar rencana kerja bidang Kepemudaan. Untuk sarana dan Prasarana kami juga belum ada sama sekali untuk Kepemudaan. Kami hanya memanfaatkan apa yang ada seperti lapangan upacara dijadikan tempat latihan marching band. Untuk diluar itu Organisasi Kepemudaan harus mengajukan proposal dan segala kelengkapan syarat untuk mendapatkan Dana Hibah dan Bidang Kepemudaan sendiri hanya memberikan rekomendasi untuk ditindak lanjuti oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Kantor Walikota Dumai”

Selanjutnya dari hasil wawancara yang penulis lakukan, menurut Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Guspian atau Agus Tera bentuk Memberikan Bimbingan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata kepada Organisasi Kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia.

“Komite Nasional Pemuda Indonesia adalah Induk Organisasi Kepemudaan, jadi segala bentuk aktifitas Organisasi Kepemudaan dibawah koordinasi kita. Seharusnya KNPI ini mendapatkan anggaran yang khusus untuk kemudian di alokasikan lagi kepada Organisasi Kepemudaan yang resmi dibawah koordinasi KNPI. Seperti halnya Siak yang KNPI nya mendapatkan Anggaran tiap tahun itu 2 Miliar. Jadi, selama abang memimpin KNPI, karena saya tau anggaran itu tidak ada kalua adapun kecil makanya abang membuat system Kekeluargaan. Untuk Koordinasi KNPI dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata itu untuk mendapatkan Dana Anggaran. Sebelum saya memimpin kita sempat Vakum dari bantuan Dana. Setelah kepengurusan saya kita dibantu 2 tahun sekali setelah ini mungkin menjadi 1 tahun sekali dan

Dinas Kepemudaan hanya memberikan rekomendasi, kami menyiapkan proposal kemudian kami ajukan kepada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata seterusnya mereka mengecek kelengkapan berkas untuk diberikan rekomendasi ditujukan ke Bagian Kesejahteraan Rakyat. Jadi, kami KNPI hanya mendapatkan Bantuan Dana Hibah setiap tahun sebesar Rp. 150.000.000.-, dan Dana inilah yang kami kelola untuk menjalankan visi misi kami. Kalau Dana sekian dibagikan dengan 47 Organisasi Kepemudaan tidak akan cukup. Makanya saya buat system kekeluargaan, dengan Dana segitu bagaimana mempererat hubungan antar Organisasi Kepemudaan Kota Dumai. Karena Pramuka dan Karang Taruna serta beberapa Organisasi yang lain mereka juga mendapatkan Dana Hibah juga makanya untuk KNPI tidak terlalu besar anggarannya.”

Selanjutnya dari hasil wawancara yang penulis lakukan, menurut Wakil Ketua Organisasi Kepemudaan Pramuka Bapak H. Syarifuddin, M.Pd bentuk Memberikan Bimbingan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk Gerakan Pramuka.

“Gerakan Pramuka ini bukan lah bagian dari Organisasi Kepemudaan melainkan Organisasi Pendidikan nonformal, yang artinya melaksanakan Pendidikan diluar sekolah atau pendidikan Formal. Gerakan Pramuka ini diarahkan kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata karena tujuannya mendidik kaum muda. Dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas yang memberikan rekomendasi untuk mendapatkan Dana Hibah. Jadi, Gerakan Pramuka tidak ada sangkutpaut dengan Organisasi Kepemudaan melainkan Organisasi Pendidikan Non Formal dan disahkan oleh Undang- undang No. 12 Tahun 2010. Gerakan pramuka di beri bantuan dana hibah setahun sekali sebesar kurang lebih Rp. 135.000.000/tahun melalui rekomendasi dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Kami membuat proposal dan melengkapi berkas syarat- syarat yang ditentukan”

Selanjutnya dari hasil wawancara yang penulis lakukan, menurut Bang Aji selaku Kepala Bidang di Organisasi Kepemudaan Purna Paskibraka Indonesia cabang Dumai bentuk Memberikan Bimbingan dari Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan Pariwisata kepada Organisasi Purna Paskibraka Indonesia cabang Dumai.

“ Purna Pskibraka adalah tempat berhimpun para purna paskibraka atau yang lulus menjadi petugas dalam upacara bendera, PPI ini membina para kader- kader pasukan pengibar bendera yang diambil dari Sekolah Menengah Atas, mereka diseleksi hingga menjadi pasukan inti pengibar bendera pusaka. Penyeleksian dimulai dari awal tahun sampai mereka dipilih menjadi purna paskibraka Indonesia Kota Dumai yaitu pada 17 Agustus. PPI ini berkoordinasi langsung dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata karena menjadi Program Rutin dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang didasari oleh Surat Keputusan (SK) dari Walikota Dumai menjadikan PPI masuk dalam Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 1 Periode. PPI langsung menjadi Program Rutin dengan anggaran kurang lebih Rp. 513.000.000.-/tahun. Ini salah satu bentuk Pembinaan dan bimbingan langsung dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.”

Selanjutnya dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Bapak H. Said Mustafa bentuk Memberikan Bimbingan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk Palang Merah Indonesia.

“Palang Merah Indonesia (PMI) adalah Organisasi Kemanusiaan yang bernaung pada Dinas Kesehatan di Daerah. Jadi, PMI bukan bagian Kepemudaan. PMI berkoordinasi langsung kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan, Koordinasi yang dilakukan untuk meminta Rekomendasi Bantuan Dana Hibah, sama halnya dengan Organisasi lainnya. PMI mempunyai Organisasi binaan untuk pemuda yaitu Palang Merah Remaja (PMR) dibentuk sejak 24-25 Januari 1950 sewaktu Kongres PMI ke-4. PMR berkoordinasi langsung dibawah naungan PMI. PMR adalah bagian dari Organisasi Kepemudaa. Tetapi, PMR belum turut ikutserta dibawah naungan Komite Nasional Pemuda Indonesia sebagai induk Organisasi Kepemudaan Indonesia di Kota Dumai. Dikarenakan, belum adanya program- program yang dilaksanakan oleh KNPI. KNPI belum aktif secara menyeluruh, keaktifan KNPI baru dimulai sewaktu Musyawah Daerah yang terakhir.”

Selanjutnya dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Muhammad Taufik Ikhsan dan Kepala Bidang Kepemudaan Muhammad Khadafi Bimbingan yang diberikan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

“Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah Organisasi Kepemudaan berbasis Keislaman, segala kepengurusan harus berasal dari Mahasiswa dan beragama Islam. HMI pendanaannya berasal dari Alumni Himpunan Mahasiswa Islam yang tergabung dalam KAHMI (Kumpulann Almuni Himpunan Mahasiswa Islam). Antara HMI dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata belum pernah melakukan Koordinasi mengenai Pendanaan. Seringkali Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata ketika berhubungan dengan Dana Bantuan mengatakan tidak ada Anggaran. Padahal HMI seringkali mengikuti Event dan Program dari Nasional, Provinsi di berbagai acara Kepemudaan. Bimbingan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tidak pernah mengenai HMI. Untuk mengikuti Event dan Program serta Kegiatan HMI berharap dari Bantuan dari para Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. HMI belum ada hubungan yang signifikan dengan KNPI, HMI sendiri belum masuk dibawah naungan Koordinasi KNPI.”

Selanjutnya dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Para Pembina Marching Band Gitawibawa Praja dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bentuk Memberikan Bimbingan kepada Marching Band Gitawibawa Praja.

“Marching Band merupakan wadah bagi remaja- remaja untuk memiliki kegiatan diluar sekolah, kegiatannya berupa Bimbingan Musik Orkestra. Marching Band ini baru dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Dumai Periode 2015- 2020 pada Rapat Rencana Kerja. Marching Band mempunyai Anggaran Dana sebesar Rp. 131.000.000.-/tahun. Marching Band mempersiapkan Marching Band dimulai pada Bulan April sampai untuk dipersiapkan untuk hari- hari besar. Remaja-remaja ini dilatih rutin setiap malam 1 bulan sebelum mereka

ditampilkan. Bimbingan lain juga seperti pengadaan alat band, Puding atau Konsumsi dan Uang Bimbingan setelah penampilan. Marching Band langsung dibawah pengawasan dan Bimbingan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan tidak termasuk dibawah Koordinasi KNPI. Selanjutnya bimbingan yang dilakukan juga berupa penanaman sifat nasionalisme berkaitan dengan dasar- dasar berorganisasi.”

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata belum optimal dan menyuluruh, karena kurangnya Anggaran untuk membuat program khusus Organisasi Kepemudaan sehingga dalam hal ini Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Dumai belum bisa melaksanakan fungsinya secara penuh yaitu sebagai Induk Organisasi Kepemudaan. Adapun yang menjadi Program Rutin dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah Paskibraka dan Maching Band karena langsung dari Surat Keputusan (SK) Walikota Dumai.

2. Memberikan Pengarahan

Memberikan Pengarahan berarti membuat Organisasi Kepemudaan turut serta dalam Pembangunan Daerah berdasarkan visi dan misi Organisasi serta Penempatan Keahlian Organisasi.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bentuk Memberikan Pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata kepada Organisasi Kepemudaan.

“Untuk Pengarahan yang Dinas lakukan saat ini belum ada, justru sepertinya belum pernah direncanakan, itu dikarenakan Organisasi Kepemudaan itu bersifat Independen dan lebih ingin bergerak sendiri

daripada kami arahkan. Organisasi Kepemudaan bergerak berdasarkan visi dan misi mereka, serta Program- program yang mereka rencanakan. Jadi, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tidak ikut andil dalam mengarahkan mereka. Hal yang Dinas lakukan saat ini hanya pemberian Rekomendasi untuk ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Kantor Walikota untuk mendapatkan Dana Hibah. Selebihnya Pengarahan yang dilakukan tidak ada. Untuk memberikan Motivasi itu hanya dalam acara- acara yang mereka laksanakan itupun kalau Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata diundang.”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda, Organisasi Kepemudaan dan Sarana dan Prasarana Pemuda bentuk Memberikan Pengarahan untuk Organisasi Kepemudaan Kota Dumai.

“Seperti yang kita tahu, Organisasi Kepemudaan ini punya jalan sendiri untuk menjalankan visi dan misi mereka. Mereka bergerak bukan dari arahan atau perintah diluar Organisasinya. Organisasi Kepemudaan memiliki visi dan misi serta bergerak dan menjalankan Organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Jadi, mereka hanya bergerak melalui perintah dan ketentuan dari apa yang tertulis dalam AD/ART Organisasi masing- masing.”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Guspiant bentuk Memberikan Pengarahan yang diberikan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

“Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Dumai bergerak berdasarkan musyawarah dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI terbaru, kenapa demikian karena program dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata itu belum ada, bahkan selama ini memang tidak pernah ada. Karena Dinas Kepemudaan sendiri mungkin mempunyai dasar bahwa setiap Organisasi Kepemudaan ini bersifat mandiri, tidak butuh arahan apapun. Disinilah saya sebagai Ketua KNPI Kota Dumai ingin membangkitkan gairah Organisasi Kepemudaan agar turut serta untuk Membangun Kota Dumai supaya lebih maju. Kita tahu peran

Pemuda ini sangat berpengaruh bilamana Pemudanya bersinergi dan bekerja sama dan ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi Kota Dumai.”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Wakil Ketua Gerakan Pramuka Bapak H. Syarifuddin, M.Pd bentuk Memberikan Pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

“Untuk Pengarahan yang diberikan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terhadap Organisasi Gerakan Pramuka itu tidak ada, karena Gerakan Pemuda sendiri adalah bagian dari Organisasi Pendidikan Non Formal, Gerakan Pramuka pun bergerak atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga samam seperti Organisasi yang lain yang bersifat independen dan mandiri. Pembinaan yang Gerakan Pramuka lakukan untuk Siswa- siswi Sekolah itu melalui Koordinasi dan arahan dari Dinas Pendidikan Kota Dumai. Memang untuk hal Bantuan Dana Hibah Gerakan Pramuka melalui rekomendasi dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Jadi, Gerakan Pramuka ini fleksibel bisa melakukan Koordinasi kepada Instansi lainnya. Dari Dinas Kepemudaan sendiri mungkin belum diprogramkan, jika ada arahan dari Dinas Kepemudaan atau dari Dinas lain untuk ikut menjalankan Program yang diberikan kami siap mengikutinya dengan dasar- dasar kami.”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Kepala Bidang di Organisasi Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Dumai bentuk memberikan Pengarahan yang diberikan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk Organisasi Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Dumai.

“Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Dumai memang langsung dibawah Koordinasi dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, PPI diarahkan dengan Program langsung dari Pemerintahan Kota Dumai, artinya PPI harus siap dalam segala acara yang menyangkut didalamnya acara- acara resmi yang membutuhkan tenaga dari anggota Paskibraka, seperti Hari Kemerdekaan Indonesia, Hari Sumpah Pemuda, Hari lahirnya

Kota Dumai, pembekuan pengurus, pelantikan pengurus dan yang lain-lain juga. Program Pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk Organisasi PPI itu ada dan PPI juga berkoordinasi dengan Dinas- Dinas yang lain di Kota Dumai, seperti Dinas Pendidikan yang mengarahkan kami mencari dan membina bibit Paskibraka disekolah- sekolah yang ada di Kota Dumai serta mempersiapkan mereka untuk ikut dalam seleksi Paskibraka tingkat Kota, Provinsi dan Nasional. Jelas segala aktifitas kami telah di Anggarkan di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai yang menjadi Program Rutin Dinas.”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Bapak H. Mustafa Said bentuk Memberikan Pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dinas terhadap Organisasi Palang Merah Indonesia (PMI).

“untuk pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk PMI belum ada program nya, jadi PMI bergerak berdasarkan apa yang menjadi visi dan misi Organisasi serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi PMI. Kalau ada Program dari Dinas Kepemudaan itu lebih bagus dan sangat ditunggu- tunggu karena dapat memudahkan kami dalam bergerak. PMI ini juga fleksibel dimana Instansi yang ingin Berkoordinasi bersama kami dan membuat Program untuk mengarahkan PMI kami siap dengan segala pertimbangan didalam musyawarah. Contohnya PMI berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan yang mengarahkan untuk Masuk ke dalam Sekolah- Sekolah di Kota Dumai untuk Membina Palang Merah Remaja Sekolah. PMI sebenarnya dibawah Koordinasi dari Dinas Kesehatan dan sudah ada Programnya, seperti Donor Darah Keliling dan lain- lain. Itu adalah salah satu Program Arahan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan.”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Muhammad Taufik Ilham bentuk Pengarahan yang diberikan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terhadap Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam.

“untuk pengarahan yang diberikan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai terhadap Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) belum ada sampai saat ini, kami juga belum mendapatkan informasi bahwa ada Program pengarahan dari Dinas Kepemudaan, HMI juga berjalan berdasarkan apa yang telah dimusyawarahkan juga dari visi dan misi dan juga ketentuan AD/ART Organisasi. HMI bergerak secara mandiri dan kalau adapun program pengarahan dari Dinas, itu harus kami tela’ah karena takutnya bertentangan dengan ketentuan di Organisasi.”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, menurut para Pembina Marching Band Gitawibawa Praja dari Dinas Kepemudaan bentuk Pengarahan yang diberikan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

“Marching Band ini memang langsung di Bina oleh Dinas, segala kepengurusan aada pada Dinas Kepemudaan, kami memberikan Bimbingan dan Pengarahan, Pengarahan yang kami lakukan yaitu mempersiapkan para remaja- remaja sekolah mulai dari Smp kelas 2 dan SMA kelas 2 dan 3 untuk ikut dalam acara- acara ceremonial Kota Dumai seperti Hari Kemerdekaan, Ulang Tahun Kota Dumai, Hari- hari besar lainnya. Karena Marching Band adalah Program rutin dari Dinas Kepemudaan, jadi segala aktifitas Marching Band telah kita susun”

Dari hasil wawancara diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa tidak adanya Program dan Perencanaan untuk Memberikan Pengarahan kepada Organisasi Kepemudaan Kota Dumai. Kurangnya Koordinasi antara Dinas dan Organisasi Kepemudaan untuk membantu menyelesaikan permasalahan- permasalahan yang ada di Kota Dumai.

3. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan berarti mengadakan kegiatan untuk menambah pengetahuan mereka seperti Seminar. Pelatihan berarti mengadakan kegiatan untuk menambah keahlian Pemuda seperti Workshop dan pelatihan lainnya.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bentuk Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk Organisasi Kepemudaan Kota Dumai.

“dari Dinas sendiri belum pernah mengadakan Pendidikan dan Pelatihan, karena kami tidak mempunyai anggaran untuk mengadakan Pendidikan dan Pelatihan, makanya sampai saat ini untuk merencanakan itu dari pihak Dinas belum mempunyai kesanggupan. Kecuali Paskibraka dan Marching Band karena keduanya ini udah di programkan.”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bentuk memberikan Pendidikan dan Pelatihan terhadap Organisasi Kepemudaan Kota Dumai.

“Program untuk membuat Pendidikan dan Pelatihan bagi Organisasi Kepemudaan Kota Dumai belum pernah di programkan. Karena keterbatasan anggaran yang Dinas punya”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata bentuk Memberikan Pendidikan dan Pelatihan terhadap Organisasi Kepemudaan Kota Dumai.

“Pendidikan dan Pelatihan bagi Organisasi Kepemudaan belum pernah direncanakan. Karena keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata bentuk Memberikan Pendidikan dan Pelatihan terhadap Organisasi Kepemudaan Kota Dumai.

“untuk Program Pendidikan dan Pelatihan itu menjadi ruang lingkup dari Seksi Organisasi Pemuda dan Seksi Pemberdayaan Pemuda, jadi ruang lingkup Seksi Sarana dan Prasarana tidak mencakup itu”

Dari Hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia bentuk Memberikan Pendidikan dan Pelatihan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

“Program pendidikan dan Pelatihan dari Dinas Kepemudaan tidak pernah direncanakan. Organisasi Kepemudaan hanya mengikuti pendidikan dan pelatihan diluar Kota Dumai dan itupun melalui Dana kami sendiri. KNPI juga tidak pernah diberi amanat untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan untuk Organisasi Kepemudaan Kota Dumai.”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Wakil Ketua Gerakan Pramuka bentuk Memberikan Pendidikan dan Pelatihan terhadap Organisasi Gerakan Pramuka dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

“Untuk Pendidikan dan Pelatihan dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata belum pernah ada programnya. Kami membuat Pendidikan dan Pelatihan sendiri, bantuan dana yang kami terima itu kami membuat perencanaan untuk membuat Pendidikan dan Pelatihan.”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Kepala Bidang Organisasi Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Dumai bentuk Memberikan Pendidikan dan Pelatihan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

“Paskibraka adalah Program rutin dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. Jadi, bentuk Pendidikan dan Pelatihan yang kami dapat memang sudah diprogramkan, kami mendapatkan anggaran program rutin dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Dumai bentuk Memberikan Pendidikan dan Pelatihan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

“belum ada Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. HMI ketikan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kader Pemuda tingkat Provinsi menggunakan biaya sendiri”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Ketua Palang Merah Indonesia bentuk memberikan pendidikan dan pelatihan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

“bentuk Pendidikan dan Pelatihan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata belum ada, karena PMR sebagai binaan dari PMI belum pernah mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan Pemuda dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata”.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Pembina Marching Band Gitawibawa Praja bentuk Memberikan Pendidikan dan Pelatihan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

“Pendidikan dan Pelatihan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untung marching band langsung melalui Program Rutin Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. Pendidikan dan Pelatihan diberikan langsung oleh Pembina Marching Band yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, penulis mengambil kesimpulan bahwa Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata belum pernah memberikan Pendidikan dan Pelatihan untuk Organisasi Kepemudaan Kota Dumai, hal ini dikarenakan kurangnya anggaran yang dipunyai oleh Dinas. Dinas juga belum pernah membicarakan hal ini dengan Organisasi Kepemudaan Kota Dumai. Pemberian Pendidikan dan Pelatihan hanya terbatas pada Organisasi yang menjadi Program Rutin dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai yaitu Paskibraka dan Marching Band.

4. Memberikan Instruksi- Instruksi

Instruksi berarti memberikan perintah langsung untuk melakukan sesuatu.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Kepala Bidang, bentuk memberikan Instruksi yang diberikan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terhadap Organisasi Kepemudaan Kota Dumai.

“Untuk mengintruksi Organisasi Kepemudaan yang ada belum pernah Dinas lakukan, Karena setiap Organisasi itu mempunyai jalan mereka sendiri, mereka independen, mandiri dan bergerak berdasarkan apa yang menjadi visi dan misi mereka. Patokan mereka atau standarnya mereka itu berasal dari AD/ ART masing- masing Organisasi. Kapasitas dari Dinas itu kurang mempunyai Sumber Daya Manusia untuk mengcover semua Organisasi dan Anggaran yang dipunya Dinas juga tidak bisa mengcover Semua Organisasi Kepemudaan Kota Dumai.”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Kepala Seksi Organisasi Pemuda Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bentuk

Memberikan Instruksi- Instruksi terhadap Organisasi Kepemudaan Kota Dumai.

“Organisasi Kepemudaan itu bersifat mandiri, jika ingin mengintruksi mereka itu harus dirapatkan bersamaan dengan mereka. Sampai saat ini belum ada rencana kami dari pihak Dinas untuk memberikan instruksi-instruksi kepada Organisasi Kepemudaan Kota Dumai, belum ada nya ide dan gagasan juga sebagai salah satu Memberikan Instruksi belum bisa dirancang”.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai bentuk Memberikan Instruksi- Instruksi terhadap Organisasi Kepemudaan Kota Dumai.

“belum ada rencana untuk memberikan instruksi kepada Organisasi Kepemudaan dan hal itu belum pernah dibicarakan.”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, menurut Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai bentuk Memberikan Instruksi- Instruksi terhadap Organisasi Kepemudaan Kota Dumai.

“perencanaan untuk memberikan intruksi kepada Organisasi Kepemudaan dari pihak Dinas belum ada, dikarenakan kapasitas dinas dan sumber daya dinas yang belum mencukupi, dengan sifat mandiri nya para Organisasi Kepemudaan”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, menurut Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) bentuk memberikan Instruksi- instruksi yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terhadap Organisasi Kepemudaan.

“Setiap Organisasi Kepemudaan itu mempunyai visi dan misi serta AD/ART masing- masing. Kalaupun ada Instruksi dari Dinas berarti harus Dinas itu mempelajari AD/ ART dan visi misi kami baru kemudian diadakan musyawarah. Sampai saat ini Organisasi Kepemudaan itu berjalan dengan independen dan mandiri, tidak ada campur tangan dari pihak luar Organisasi. Sampai saat ini belum ada Musyawarah yang diadakan oleh pihak Dinas.”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Wakil Ketua Gerakan Pramuka bentuk Memberikan Instruksi- instruksi dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

“Gerakan Pramuka ini fleksibel selagi dari pihak pemerintah mengetahui Pramuka bergerak dibidang apa, Pihak Dinas belum pernah menghubungi kami ataupun membuat Musyawarah untuk selanjutnya diberikan instruksi.”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Sekretaris Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Dumai bentuk memberikan Instruksi dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

“PPI sebagai bagian dari Program Rutin Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai kewajiban untuk mengikuti instruksi dari Dinas. Misalkan PPI diberikan instruksi untuk menjadi pengibar bendera pada pelantikan- pelantikan resmi pemerintah”.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Dumai bentuk Memberikan instruksi- instruksi dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

“PMI belum pernah diberikan instruksi dari Dinas Kepemudaa, Olahraga dan Pariwisata, PMI biasanya diberikan Instruksi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai, adapun PMR diinstruksi oleh PMI sebagai Pembina PMR”.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Dumai bentuk memberikan instruksi- instruksi dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

“HMI belum pernah di instruksi oleh Dinas ataupun Pemda, HMI bergerak atas asas yang berlaku pada AD/ART dan kami tidak menerima instruksi dari siapapun yang bertolak belakang dengan cita- cita, visi misi dan AD/ART organisasi kami”.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Pembina Marching Band Gitawibawa Praja bentuk memberikan instruksi- instruksi dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

“MarchingBand ini langsung dibina oleh pihak Dinas, pembinanya berasal dari Internal Dinas, segala aktifitas Marchingband sudah diatur oleh Pembina, Dinas tinggal menginstruksikan Marchingband ini harus apa, mengenai latihan, komposisi, perlengkapan dan lain-lain.”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Penulis mengambil kesimpulan bahwa Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata belum pernah memberikan Instruksi- instruksi kepada Organisasi Kepemudaan Kota Dumai dikarenakan kurangnya sumber daya yang lebih memahami persoalan Kepemudaan ini. Hanya yang menjadi Program Rutinlah yang mendapatkan Instruksi dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

5. Memberikan Buku Petunjuk

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bentuk Memberikan Buku Petunjuk untuk Organisasi Kepemudaan Kota Dumai.

“untuk memberikan Buku- buku atau referensi tidak pernah Dinas lakukan, bahkan Dinas tidak pernah merencanakan untuk hal itu, jikalau adapun Dana nya tidak ada, saat ini Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata hanya berjalan dengan apa yang telah ditentukan di Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai pada periode 2015- 2020.”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Kepala Seksi Organisasi Pemuda Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bentuk Memberikan Buku Petunjuk untuk Organisasi Kepemudaan Kota Dumai.

“Organisasi Kepemudaan itu mempunyai referensi- referensi mereka sendiri, jika berharap dari pihak Dinas pastinya tidak ataupun belum pernah direncanakan karena anggaran yang Dinas miliki tidak terlalu besar untuk membina Organisasi-organisasi Kepemudaan”.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bentuk Memberikan Buku Petunjuk untuk Organisasi Kepemudaan Kota Dumai.

“belum pernah Dinas lakukan, karena anggaran yang dimiliki Dinas tidak bisa mencakup itu, keterbatasan anggaran membuat program untuk Organisasi Kepemudaan tidak bisa dilaksanakan.”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bentuk Memberikan Buku Petunjuk untuk Organisasi Kepemudaan Kota Dumai.

“tidak ada anggarannya, untuk mempersiapkan buku petunjuk atau referensi- referensi juga membutuhkan biaya yang besar.”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) bentuk Memberikan Buku Petunjuk dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terhadap Organisasi Kepemudaan Kota Dumai.

“Pemberian Buku Petunjuk yang dilakukan oleh Dinas itu tidak pernah dilakukan, Organisasi Kepemudaan Kota Dumai belum pernah di berikan referensi atau buku- buku dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Adapun buku- buku yang Organisasi ada itu adalah Arsip Organisasi yang dibeli memakai uang pribadi dan Organisasi.”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Wakil Ketua Gerakan Pramuka bentuk Memberikan Buku Petunjuk dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

“Belum pernah diberikan buku-buku dari Dinas, kami mempunyai buku yang kami beli dengan uang sendiri dan Gerakan Pramuka juga sudah membuat buku jadi referensi kami kebanyakan dari buku milik Gerakan Pramuka Sendiri”.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Sekretaris Purna Paskibaraka Indonesia (PPI) Kota Dumai bentuk Memberikan Buku Peunjuk dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

“PPI belum pernah diberikan buku oleh Dinas, referensi yang kami punya langsung dari Senior dan Pembina Organisasi kami”.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) bentuk Memberikan Buku Petunjuk dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

“PMI belum ada mendapatkan buku Petunjuk dari Dinas Kepemudaan, kami memiliki sendiri buku- buku dan dibeli memakai uang kas Organisasi dan Pemberian anggota”.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Kota Dumai bentuk Memberikan buku Petunjuk dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

“HMI belum pernah mendapatkan buku-buku dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata . Buku- buku yang HMI miliki adalah dari pendahulu dan alumni- alumni HMI”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Pembina Marching Band Gitawibawa Praja bentuk Memberikan Buku Petunjuk dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

“untuk Marching Band tidak ada buku petunjuk, karena mereka langsung dibina oleh pelatih yang telah disiapkan untuk mengajar mereka bermain alat music”.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan diatas, penulis mangambil kesimpulan bahwa Memberikan Buku Petunjuk belum terlaksana karena anggaran yang dipunyai oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai tidak besar.

6. Wawancara dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kantor Walikota Dumai

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Bapak Alfiansyah Staff Bagian Administrasi Kesejahteraan Sosial Jalur anggaran yang diterima oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

“Anggaran dipengaruhi oleh Rencana Kerja Pemerintah Periode 2015-2020. Diskopar mempunyai rencana Kerja selama 1 periode yaitu 5 tahun periode 2015- 2020 yang berarti selama 5 tahun berdasarkan kesepakatan

yang mereka sanggupi pada rapat kerja seluruh Dinas untuk membantu walikota mencapai visi dan misi. Program rutin yang menjadi kewenangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bidang Kepemudaan adalah Paskibraka dan Marching Band. Keduanya menjadi program rutin yang langsung dikeluarkan Surat Keputusan dari Walikota Dumai. Organisasi Kepemudaan yang terdaftar pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata harus menjadi naungan Pemerintah berdasarkan UU, Pendanaannya dengan dana hibah yang direkomendasi oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata ke Kantor Walikota Dumai Bagian Kesejahteraan Rakyat. Lalu, Kesra mengirim lagi berkasnya ke Dinas Keuangan untuk dicek Keuangan dan Kesanggupan Daerah. Organisasi Kepemudaan menyiapkan Proposal dan persyaratan yang ditentukan oleh pihak Dinas.”

C. Hambatan- hambatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di peroleh informasi tentang Peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kota Dumai, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor- faktor penghambat Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan yaitu :

1. Minimnya Anggaran Dana yang dipunyai oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam melakukan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Kota Dumai,
2. Kurangnya Koordinasi antara Dinas terkait dengan Organisasi Kepemudaan Kota Dumai, Tidak adanya Perencanaan khusus untuk melakukan Pembinaan Organisasi Kepemudaan untuk diberdayai dalam setiap lingkup Pembangunan Daerah.
3. Dinas terkait kurang memperhatikan permasalahan Kepemudaan.

4. Kurangnya Sumber Daya yang dipunya oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam hal memahami permasalahan Kepemudaan.
5. Kesadaran Organisasi Kepemudaan yang rendah untuk menyampaikan aspirasi, ide dan gagasan kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
6. Kurangnya Koordinasi antar Dinas untuk ikut membantu Pembinaan Organisasi Kepemudaan Kota Dumai.





Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemberian Bimbingan

Dalam hal Pemberian Bimbingan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai terhadap Organisasi Kepemudaan Kota Dumai belum berjalan maksimal, kendala- kendala yang dihadapi dalam Pemberian Bimbingan ini berupa Anggaran Dana untuk melaksanakan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Kota Dumai. Bantuan dana pun tidak menyulur terhadap Organisasi Kepemudaan, yang dianggarkan dan menjadi Program Rutin dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai adalah 2 Organisasi Kepemudaan yaitu Paskibraka sebesar Rp. 513.000.000.- dan Marching Band sebesar Rp. 131.000.000.-. Sedangkan yang mendapatkan bantuan Dana Hibah yang menjadi rekomendasi dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebesar Rp. 150.000.000.- dan Gerakan Pramuka sebesar Rp. 135.000.000.-.

2. Memberikan Pengarahan

Dalam Memberikan Pengarahan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai terhadap Organisasi Kepemudaan Kota Dumai belum berjalan maksimal, Tidak adanya program- program yang merancang pengarahan yang akan diberikan kepada Organisasi Kepemudaan. Pengarahan yang diberikan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata hanya

berbatas pada yang menjadi Program Rutin mereka yaitu Paskibraka dan Marching Band. Sedangkan pengarahan bagi KNPI dan Pramuka hanya terbatas pada pemberian rekomendasi untuk mendapatkan Dana Hibah. Seharusnya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata lebih memahami permasalahan yang ada, dengan mengikut sertakan Organisasi Kepemudaan dan para Pemuda Kota Dumai untuk mencari jalan keluar. Kurangnya Pemahaman dalam Memberikan Pengarahan kepada Organisasi Kepemudaan juga menjadi hal yang harus diselesaikan oleh Dinas karena kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten dan anggaran yang minim. Kurangnya kesadaran para Organisasi Kepemudaan untuk mau memberikan aspirasi, ide dan gagasan kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

3. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan

Memberikan Pendidikan dan Pelatihan dalam hal ini Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai sama sekali belum pernah mengadakan. Dikarenakan anggaran yang dipunya begitu minim dan kurangnya semangat dalam mencari bantuan anggaran dalam memberikan Pendidikan dan Pelatihan kepada Organisasi Kepemudaan Kota Dumai. Banyak Organisasi Kepemudaan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan diluar ruang lingkup Dinas dan belum diperhatikan bantuannya oleh Dinas dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan tersebut. Pendidikan dan Pelatihan diprioritaskan hanya kepada Organisasi Paskibraka dan Marching Band karena menjadi Program Rutin dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

4. Memberikan Instruksi- Instruksi

Dalam hal Memberikan Instruksi- Instruksi dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai kepada Organisasi Kepemudaan Kota Dumai belum berjalan dengan baik. Kurangnya Pemahaman dan Sumber Daya yang kompeten dibidang Kepemudaan membuat pemberian Instruksi untuk Organisasi Kepemudaan tidak berjalan. Pihak Dinas berfikir bahwa Organisasi Kepemudaan tidak perlu diberikan instruksi karena mereka mandiri dan independen. Pihak Organisasi juga kurang kesadaran untuk memberikan aspirasi, ide dan gagasan supaya diberi instruksi melakukan sesuatu hal.

5. Memberikan Buku Petunjuk

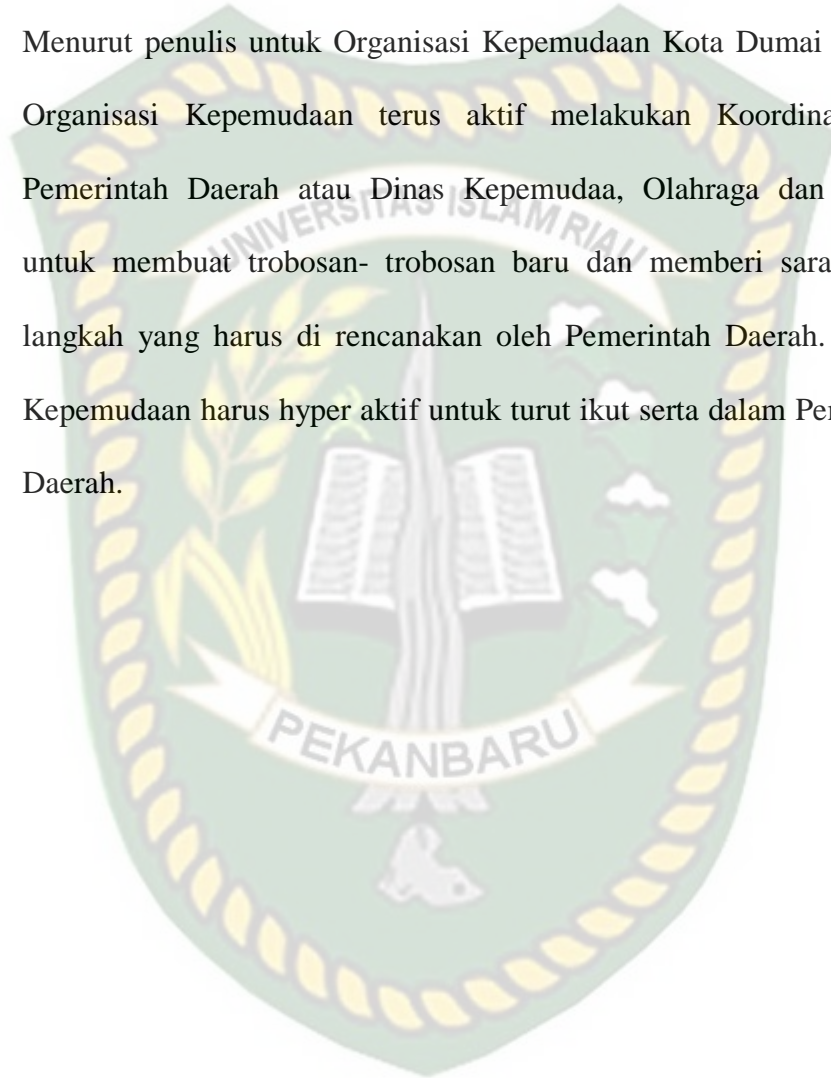
Dalam hal Memberikan Buku Petunjuk dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai belum terlaksana, dikarenakan belum adanya anggaran, program, ide dan perencanaan untuk melakukan hal tersebut.

B. Saran

1. Menurut penulis untuk Pemerintah Daerah atau Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata seharusnya lebih memperhatikan potensi yang ada pada pemuda terkhusus Organisasi Kepemudaan sehingga membuat Organisasi- organisasi lebih aktif untuk melaksanakan kegiatan- kegiatan positif yang akan meringankan beban dari Pemerintah terhadap persoalan Pemuda. Potensi- potensi ini dibina langsung untuk menggapai cita- cita Negara dan Daerah. Kita tau bahwa Pemuda adalah tonggak perjuangan

yang memiliki kreatifitas dalam melakukan banyak hal. Seharusnya Pemerintah Daerah atau Dinas Terkait terus memperbaiki dan mempererat kerjasama dengan Organisasi Kepemudaan untuk mempermudah dan meringankan langkah Pemerintah dalam Membangun Daerah.

2. Menurut penulis untuk Organisasi Kepemudaan Kota Dumai seharusnya Organisasi Kepemudaan terus aktif melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau Dinas Kepemudaa, Olahraga dan Pariwisata untuk membuat trobosan- trobosan baru dan memberi saran langkah-langkah yang harus di rencanakan oleh Pemerintah Daerah. Organisasi Kepemudaan harus hyper aktif untuk turut ikut serta dalam Pembangunan Daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. 1974. *Pemuda dan Perubahan Sosial*, Jakarta: PT. Pustaka
- Budiarjo, Miriam, 2000. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Matutu, Mustamin, 1999. *Mandar, Delegasi, Atribusi dan Implementasi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Effendi, Mahrizal. 2003. *Pembinaan Ekonomi dan Budaya Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Gibson Dkk. 1998. *Organization. (Terjemahan Dhana Agus)*. Jaakarta: Erlangga.
- Hagemann, Gisela. 1993. *Motivasi Untuk Pembinaan Organisasi*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Hadayaningrat, Soewarno. 1981. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Hajimasagung.
- Hasibuan, P.S. Malayu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kartasasmita. 1996. *Memberdayakan Generasi Muda Penerus Bangsa*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Kansil C.S.T 1998. *Aku Pemuda Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Kansil, C.S.T dan Kansil C.S.T 2008 *Pemerintahan Daerah di Indonesia: Hukum Adminitrasi Dareah* Jakarta: Sinar Grafika.
- Kemenpora, 1992. *Harapan Pak Harto Kepada Generasi Muda Indonesia*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.
- Komaruddin, 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta : PT Pustaka
- Kountur, Ronny. 2005. *Metode Penelitian Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: PPM.
- Mangunhardjana. 2004. *Pembinaan arti dan Merodenya*. Jakarta: Kasinius.
- Mendra Wijaya. 2012. *Eklogi Pemerintahan*. Pekanbaru Alaf Riau: Pekanbaru

- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik ; Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Pranarka Dkk (1996). *Pembangunan Generasi muda dan Permasalahannya*. PT. Pelta Harapan.
- Rasyid, M. Ryaas. 1996. *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT Yarsif Watampone.
- Santoso. S (1995). *Pembinaan Dalam Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Soekanto, Soerjono, 2002. *Teori Peranan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Simanjuntak, Pasaribu. 1980, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda Tarsito Bandung*.
- Soekanto, Soerjono. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru , Rajawali Pers Jakarta
- Sugiyono. 2007. *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Syaukani, HR, 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemeritahan*. Bandung: Rineka Cipta.
- Thoha, Miftah (1989). *Pembinaan Organisasi*. Rajawali Pers Jakarta
- Wahyu Djaja. (2007). *Pemuda Harapan Bangsa*. Klaten: Cempaka Putih
- W.J.D. Poerwadarminta. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka
- Zulkifli. Dkk. 2013. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. FISIPOL UIR, Pekanbaru.

Dokumentasi

Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang RI Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Dinas Daerah Kabupaten/ Kota

Peraturan Walikota Dumai Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau